



**Rencana Pengelolaan
Pesisir Terpadu**

Kabupaten Jepara

**Tahun
2025**



RENCANA PENGELOLAAN PESISIR TERPADU **KABUPATEN JEPARA** TAHUN 2025

TIM PENYUSUN:

Akhmad Solihin
Retia Revany
Robba Fahrisy Darus
Andy Afandy
Yoppie Christian

TIM TATA LETAK:

Herdinar Novalia Junaika
Cindy Syaza Fhadilla

disusun melalui kerja sama antara



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Rencana Pengelolaan Pesisir	4
BAB II ARAH KEBIJAKAN	7
2.1. Keterkaitan dengan Agenda Nasional	7
2.2. Keterkaitan dengan Agenda Perencanaan Provinsi Jawa Tengah	8
2.3. Keterkaitan dengan Agenda Pembangunan Kabupaten Jepara	11
BAB III TUJUAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU	15
3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	15
3.1.1. Penyediaan infrastruktur secara yang luas mendukung konektivitas antar wilayah yang berkualitas dan merata, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	15
3.1.2. Pemantapan infrastruktur dalam memperkuat Pembangunan sumberdaya manusia dan ekonomi daerah	16
3.1.3. Peningkatan Pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing serta penguatan transformasi social	18
3.1.4. Peningkatan daya saing sektor ekonomi tingkat lokal, nasional dan global	19
3.1.5. Pemantapan daya saing daerah dan sumber daya manusia menuju terwujudnya Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari dan Religius	20
3.2. Pemetaan Isu Permasalahan	21
3.2.1. Tantangan Kerusakan Ekosistem Laut dan Pesisir serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Jepara	21
3.2.2. Tantangan Infrastruktur serta Sanitasi di Kawasan Pesisir Kabupaten Jepara	23
3.2.3. Permasalahan dan Solusi Sosial Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Jepara	25



3.3. Penilaian Status Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Jepara berdasarkan State of The Coast	28
BAB IV KELEMBAGAAN	51
BAB V STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN	55
5.1 Sintesis Isu Strategis	55
5.1.1. Isu Strategis Sosial–Ekonomi Kabupaten Jepara	55
5.1.2. Isu Strategis Ekologi & Sumber Daya Alam Kabupaten Jepara	56
5.1.3. Isu Strategis Sanitasi & Infrastruktur Kabupaten Jepara	57
5.2. Rencana Kegiatan.....	60
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	77
6.1. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi	77
6.2. Komponen Pemantauan dan Evaluasi	77
6.3. Rencana Pemantauan dan Evaluasi Per Tujuan	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jepara tahun 2025-2029	13
Gambar 2 Peta isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kab. Jepara	22
Gambar 3 Peta isu infrastruktur dan sanitasi Kab. Jepara	24
Gambar 4 Peta isu sosial ekonomi Kab. Jepara	26
Gambar 5 Diagram radar posisi antar elemen tata kelola Kabupaten Jepara	29
Gambar 6 Diagram radar posisi antar elemen tata kelola Kabupaten Jepara	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skala prioritas isu sumber daya pesisir dan ekologi Kab. Jepara	22
Tabel 2 Skala prioritas isu infrastruktur dan sanitasi Kab. Jepara	24
Tabel 3 Skala prioritas isu sosial ekonomi masyarakat pesisir Kab. Jepara	26
Tabel 4 Matriks rangkuman temuan kunci SoC dan rekomendasi	33
Tabel 5 Matriks isu strategis SoC, RPJPD Kab. Jepara, dan RPJMD dan pemetaan FGD Kab Jepara	47
Tabel 6 Rancangan struktur tim koordinasi pengelolaan pesisir terpadu Kabupaten Jepara	52
Tabel 7 Isu-isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah Kab. Jepara	58
Tabel 8 Isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kab. Jepara	61
Tabel 9 Isu infrastruktur dan sanitasi Kab. Jepara	64
Tabel 10 Isu sosial ekonomi Kab. Jepara	69



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis baik dari sisi geografis maupun ekonomi. Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 mdpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagai dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai.

Panjang garis pantai Jepara mencapai lebih dari 70 kilometer yang membentang di pesisir utara Pulau Jawa, menjadikannya salah satu wilayah dengan karakteristik pesisir yang khas dan beragam. Kondisi fisik pesisir Kabupaten Jepara ditandai dengan topografi dataran rendah yang landai, kemiringan relatif kecil, serta struktur geologi dan jenis tanah yang sebagian besar berupa aluvial pantai. Hidrologi wilayah ini dipengaruhi oleh keberadaan sungai-sungai kecil yang bermuara ke laut Jawa, sementara faktor iklim didominasi oleh pola monsun tropis dengan dua musim yang jelas, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kombinasi faktor-faktor fisik ini berimplikasi besar terhadap dinamika ekologi dan sosial ekonomi masyarakat pesisir Jepara.

Jepara memiliki kekayaan ekosistem pesisir bernilai ekologis dan ekonomis tinggi selain karakteristik fisiknya. Kecamatan Keling di Kabupaten Jepara memegang peranan krusial dalam ekosistem Gunung Muria karena wilayahnya mencakup hutan produksi serta hutan lindung yang menjadi habitat bagi ragam flora dan fauna pegunungan. Sementara itu, di sisi lain Kabupaten Jepara, wilayah Kepulauan Karimunjawa menyuguhkan kekayaan hayati pesisir yang tidak kalah unik. Kedua bentang alam yang kontras ini pegunungan dan kepulauan menonjolkan keberagaman geografis Jepara yang luar biasa dalam satu kesatuan administratif.

Urgensi konservasi di kawasan hutan Muria maupun pesisir Karimunjawa sangatlah tinggi demi menjaga keberlangsungan sistem penyangga kehidupan. Keberadaan kawasan lindung di kedua lokasi tersebut berfungsi sebagai benteng pertahanan ekosistem bagi berbagai spesies, termasuk flora dan fauna endemik yang dilindungi. Dengan menjaga kelestarian habitat ini, Kabupaten Jepara turut menjamin keamanan mata rantai lingkungan bagi generasi mendatang sekaligus melindungi kekayaan alam aslinya dari kepunahan.

Ekosistem terumbu karang berkembang di perairan Kepulauan Karimunjawa. Kawasan ini secara administratif termasuk Kabupaten Jepara. Kawasan ini telah dikenal luas sebagai taman nasional dengan tingkat keanekaragaman hayati laut sangat tinggi. Padang lamun tersebar di perairan dangkal. Padang lamun berperan sebagai habitat penting bagi berbagai biota laut. Ekosistem mangrove terdapat di beberapa titik pesisir. Sebagian mangrove mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan. Ketiga ekosistem pesisir utama tersebut menopang kehidupan biota laut. Ketiga ekosistem pesisir utama tersebut memberikan jasa lingkungan penting. Jasa lingkungan tersebut mencakup perlindungan pantai dari abrasi. Jasa lingkungan tersebut mencakup penyimpanan karbon biru untuk mitigasi

perubahan iklim. Jasa lingkungan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Masyarakat lokal bergantung pada perikanan dan ekowisata.

Wilayah pesisir Jepara kaya potensi non-hayati selain potensi hayati. Daya tarik wisata bahari berkembang pesat di Karimunjawa serta pesisir daratan Jepara. Keunggulan mencakup keindahan pantai, kekayaan bawah laut, potensi wisata budaya terintegrasi industri kerajinan kayu ukir. Potensi sumber daya air, panas bumi, jasa lingkungan mendukung keberlanjutan pembangunan kawasan. Konteks ekonomi biru memungkinkan pemanfaatan potensi secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi daerah terdorong. Kelestarian lingkungan terjaga.

Potensi besar menghadapi isu strategis. Ancaman degradasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove berlangsung. Penyebab tekanan pembangunan, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, ekspansi pemukiman industri pesisir. Konflik pemanfaatan ruang laut darat muncul. Sektor perikanan, pariwisata, konservasi, industri bersaing. Perubahan iklim menimbulkan kenaikan muka air laut, frekuensi badai meningkat, abrasi pantai mengancam. Tantangan nyata menguji keberlanjutan wilayah pesisir Jepara. Intervensi kebijakan terarah terukur diminta. Dampak diminimalisasi.

Konteks kebijakan pembangunan daerah, penyusunan dokumen ini menjadi sangat penting karena memberikan dasar ilmiah bagi perumusan strategi pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Jepara yang berkelanjutan. Pendahuluan ini tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting, tetapi juga mengidentifikasi kondisi yang diinginkan di masa depan, yakni terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem pesisir. Visi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan, kolaborasi multi-



stakeholder, serta pendekatan integrasi darat-laut. Dengan demikian, dokumen kebijakan ini akan menjadi rujukan penting dalam memastikan bahwa pembangunan wilayah pesisir Jepara mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus menjaga fungsi ekologisnya dalam jangka panjang.

1.2. Tujuan Rencana Pengelolaan Pesisir

Tujuan utama penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Jepara adalah untuk menyediakan kerangka koordinasi yang sistematis atas berbagai isu, program, dan rencana yang telah dimiliki oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga arah pembangunan pesisir dapat lebih terintegrasi, efektif, dan berkesinambungan. Dengan kata lain, dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menambah dokumen perencanaan yang sudah ada, melainkan untuk memetakan, menyinergikan, dan mengharmonisasikan program-program eksisting agar lebih tepat sasaran dalam menjawab permasalahan pesisir yang dihadapi Kabupaten Jepara.

Secara lebih rinci, tujuan dokumen perencanaan ini adalah:

1. **Memetakan isu strategis dan permasalahan pesisir** yang ada saat ini
Rencana ini berfungsi sebagai instrumen identifikasi menyeluruh terhadap kondisi eksisting, termasuk tantangan degradasi ekosistem, konflik pemanfaatan ruang, serta dampak perubahan iklim dan bencana pesisir.
2. **Menginventarisasi program dan rencana pembangunan pesisir yang telah dimiliki OPD.**

Dokumen ini menampilkan peta program dari masing-masing sektor atau OPD, sehingga dapat terlihat keterhubungan, tumpang tindih, maupun kesenjangan (gap) dalam perencanaan dan implementasi.

3. Mengkoordinasikan dan menyinergikan program antar OPD

Melalui dokumen ini, berbagai program yang tersebar di banyak instansi dapat disatukan dalam kerangka yang utuh, sehingga tercapai efisiensi sumber daya, konsistensi arah kebijakan, dan peningkatan dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

4. Menyediakan dasar untuk usulan program baru

Jika terdapat isu atau permasalahan strategis yang belum tercakup dalam rencana atau program OPD, dokumen ini menjadi sarana untuk merumuskan usulan baru yang berbasis pada kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat pesisir.

5. Menjadi instrumen koordinasi kebijakan lintas sektor dan lintas level

Dokumen rencana pengelolaan pesisir ini membantu pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan pesisir selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi, serta konsisten dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra OPD, dan RTRW.



BAB II

ARAH KEBIJAKAN

2.1. Keterkaitan dengan Agenda Nasional

Arah kebijakan pengelolaan pesisir Jepara selaras dengan regulasi nasional, beberapa dokumen perencanaan utama:

- RPJPN 2025–2045 (Visi Indonesia Emas 2045) menempatkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru sebagai salah satu pilar penting untuk mencapai kedaulatan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan pesisir Jepara dapat berkontribusi terhadap penguatan sektor perikanan berkelanjutan, konservasi ekosistem pesisir, dan pengembangan pariwisata bahari berbasis komunitas yang ramah lingkungan. Dengan kata lain, Jepara dapat menjadi salah satu simpul penting dalam mendukung visi Indonesia Emas yang menekankan keberlanjutan dan inklusivitas.
- RPJMN 2025–2029 sebagai dokumen teknokratis pembangunan nasional lima tahunan menekankan agenda penguatan ketahanan lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Arah ini sangat relevan dengan kondisi Jepara, yang menghadapi ancaman nyata berupa abrasi, banjir rob, degradasi mangrove, serta tekanan terhadap ekosistem laut. Program rehabilitasi pesisir, penguatan sistem peringatan dini bencana, serta diversifikasi ekonomi pesisir yang ramah lingkungan menjadi bentuk kontribusi Jepara terhadap pencapaian agenda RPJMN.



- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 13 (*Climate Action*), Tujuan 14 (*Life Below Water*), dan Tujuan 15 (*Life on Land*), langsung bersinggungan dengan pengelolaan pesisir Jepara. Upaya rehabilitasi mangrove dan padang lamun, pengendalian pencemaran laut, serta pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan wujud nyata dukungan terhadap pencapaian target SDGs. Lebih dari itu, integrasi prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (SDG 5) juga relevan, mengingat kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat adat pesisir sering kali berada pada posisi rentan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir.
- Agenda *Net Zero Emission* 2060 dan pembangunan rendah karbon nasional juga terkait erat dengan potensi ekosistem pesisir Jepara. Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan penyerap karbon alami (*blue carbon*) yang perannya sangat signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, pengelolaan pesisir Jepara yang selaras dengan agenda ini dapat membuka peluang pembiayaan inovatif, seperti perdagangan karbon biru atau skema pembayaran jasa ekosistem, yang mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

2.2. Keterkaitan dengan Agenda Perencanaan Provinsi Jawa Tengah

Di tingkat provinsi, arah kebijakan pesisir Jepara juga selaras dengan dokumen perencanaan Jawa Tengah:

- RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi pembangunan "*Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan*". Dalam



visi tersebut, aspek kelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas. Pengelolaan pesisir Jepara berkontribusi melalui program-program yang memperkuat ketahanan nelayan, mengurangi kerentanan abrasi, serta mengembangkan sektor perikanan dan wisata bahari yang berdaya saing. Dengan posisi geografisnya di pesisir utara Jawa, Jepara menjadi salah satu daerah penting dalam mendukung program provinsi untuk penguatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu. RTRW menjadi dasar bagi pengembangan wilayah dan penataan ruang yang berkelanjutan. Dalam dokumen RTRW juga merumuskan program yang sudah dijabarkan di masing-masing periode. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jepara adalah mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam mendukung tujuan penataan ruang wilayah dirumuskan matriks indikasi program utama Kabupaten Jepara.

Kerangka kerja perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang di Kabupaten Jepara saat ini berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara periode 2023-2043. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 mengarahkan pembangunan wilayah secara tegas pada penguatan sektor unggulan berbasis pariwisata dan industri yang inklusif, dengan tetap didukung oleh potensi lokal serta pengelolaan perikanan dan pertanian berkelanjutan sebagai penopang ekonomi

masyarakat. Arah kebijakan penataan ruang ini menempatkan pariwisata, khususnya wisata bahari dan desa wisata di Karimunjawa, sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mendorong pengembangan kawasan industri yang terkendali melalui prinsip keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan UMKM/IKM, serta pengawasan pencemaran. Untuk memperkuat daya saing wilayah, kebijakan RTRW juga menekankan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar kawasan perkotaan, sehingga struktur ruang Jepara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan dalam jangka panjang..

- Program Strategis Provinsi, seperti *Jateng Green* dan *Jateng Resilience* serta *Mageri Segoro*, menekankan transisi menuju pembangunan hijau dan penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana. Arah kebijakan ini dapat diimplementasikan di Jepara melalui upaya rehabilitasi mangrove untuk mengurangi risiko abrasi, pengembangan energi ramah lingkungan di kawasan pesisir, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
- *State of the Coast* Provinsi Jawa Tengah, berfungsi sebagai landasan diagnostik yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek tata kelola dan kondisi lingkungan. Dokumen ini menghasilkan output lanjutan baik dalam kerangka manajemen pengetahuan maupun penentuan aksi- aksi yang bersifat operasional yang akan menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan pesisir maupun *stakeholder* terkait lainnya.



2.3. Keterkaitan dengan Agenda Pembangunan Kabupaten Jepara

Arah kebijakan pembangunan pengelolaan pesisir Kabupaten Jepara tidak bisa dilepaskan dengan RPJMD Kabupaten Jepara 2025–2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025–2029 merupakan bentuk konkret dari penjabaran visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025–2030. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi tersebut diposisikan sebagai rumusan umum yang menjadi target atau gambaran kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada akhir masa perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, integrasi ini menjadi sangat penting karena wilayah pesisir Jepara memiliki karakteristik khusus dengan potensi sekaligus tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah daratan. Arah kebijakan pembangunan pesisir diarahkan untuk memastikan keselarasan dengan visi daerah ***"Bersama Membangun Kabupaten Jepara Yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius"***. Untuk merealisasikan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara 2025–2029, telah dirumuskan lima misi strategis yang mencakup berbagai sektor utama, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha.
2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar yang terjangkau dan berkualitas.



3. Membangun infrastruktur ekonomi, pariwisata, dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
4. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri *furniture* dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
5. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Pengelolaan pesisir terpadu di Kabupaten Jepara merupakan strategi krusial yang selaras dengan visi RPJMD 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2025. Pendekatan ini mendukung misi ketiga RPJMD, yaitu memperkuat infrastruktur ekonomi dan sosial melalui penanganan abrasi pesisir serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana, yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam pesisir sambil mendorong pertumbuhan ekonomi biru. Integrasi dengan agenda pembangunan kabupaten memastikan bahwa pengelolaan terpadu tidak hanya melindungi ekosistem mangrove dan terumbu karang, tetapi juga membuka peluang seperti pengembangan pelabuhan terpadu di Kecamatan Kembang yang terhubung dengan kawasan industri.

Lebih lanjut, keterkaitan pengelolaan pesisir terpadu dengan agenda RPJMD tahun 2025 menekankan sinergi antar-misi, khususnya misi keempat tentang pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan UMKM, di mana Perda No. 3 Tahun 2025 menjadi payung hukum untuk program prioritas triwulan pertama. Hal ini memfasilitasi penerapan *marine spatial planning* yang



holistik, mengintegrasikan konservasi biodiversitas dengan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui ekowisata dan akuakultur berkelanjutan.

Tahapan implementasi strategi dan arah kebijakan Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi disusun secara berkesinambungan selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diuraikan sebagai berikut :

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan struktur ekonomi yang tumbuh kuat dan kokoh	Penyediaan infrastruktur secara luas yang mendukung konektivitas antarwilayah yang berkualitas dan merata, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Pemantapan infrastruktur dalam memperkuat pembangunan sumberdaya manusia dan ekonomi daerah	Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing serta penguatan transformasi sosial	Peningkatan daya saing sektor ekonomi tingkat lokal, nasional dan global	Pemantapan daya saing daerah dan sumber daya manusia menuju terwujudnya Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari dan Religius

Gambar 1 Tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jepara tahun 2025-2029

Sumber: RPJMD Kab Jepara 2025-2030

Pengelolaan pesisir dalam Perda RTRW Jepara No. 4 Tahun 2023 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi kawasan pesisir. Wilayah pesisir diposisikan sebagai ruang strategis yang memiliki peran penting dalam perlindungan lingkungan, terutama melalui pelestarian ekosistem mangrove, terumbu karang, dan kawasan rawan bencana. Upaya perlindungan ini menjadi bagian dari kebijakan penataan ruang yang menekankan pentingnya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, sekaligus mengurangi risiko abrasi, banjir rob, dan degradasi habitat pesisir. Dengan demikian, kawasan pesisir tidak hanya dipandang sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai sistem ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya.

Di sisi lain, pemanfaatan ruang pesisir diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi maritim yang berkelanjutan, seperti perikanan, budidaya, pariwisata bahari, dan pengembangan pelabuhan. Perda ini menekankan pentingnya pengaturan zonasi pemanfaatan ruang agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan konflik antar-sektor maupun kerusakan lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui mekanisme perizinan, pengawasan, serta penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan pesisir Jepara diharapkan mampu menciptakan ruang yang produktif, aman, dan adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir dan pembangunan daerah.



BAB III

TUJUAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU

3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam upaya melakukan sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penanggulangan bencana di kawasan pesisir menjadi isu krusial yang harus diakomodasi ke dalam misi maupun program prioritas pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar penanganan wilayah pesisir dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi sektor lainnya. Melalui proses identifikasi yang komprehensif terhadap berbagai dinamika isu di tingkat global, nasional, maupun regional, serta dengan mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan amanat RTRW, telah dirumuskan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 dengan sasaran sebagai berikut:

3.1.1. Penyediaan infrastruktur secara yang luas mendukung konektivitas antar wilayah yang berkualitas dan merata, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jepara tahun 2026 difokuskan pada "Penguatan Landasan Pembangunan Daerah" dengan tema penyediaan infrastruktur konektivitas antarwilayah pesisir yang berkualitas, merata, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam RKPD Kabupaten Jepara 2026 yang selaras dengan RPJMD 2025-2029 (Perda No. 3 Tahun 2025). Strategi utama mencakup penguatan sarana jalan, jembatan, dan perhubungan pesisir untuk mendukung konektivitas ke Karimunjawa serta ketahanan pangan

berbasis perikanan; penyediaan prasarana dasar pendidikan dan kesehatan di desa pesisir seperti penanganan abrasi serta akses air bersih layak; serta pelayanan publik berbasis teknologi untuk monitoring degradasi mangrove. Prioritas ini menekankan penanganan kawasan pesisir utara yang rentan abrasi, sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang memasukkan proyek pelabuhan terpadu di Kembang serta infrastruktur mitigasi bencana pesisir.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pembangunan kawasan pesisir Jepara pada 2026 memprioritaskan penguatan tata kelola transparan melalui sarana pelayanan publik di pelabuhan kecil, infrastruktur IT untuk digitalisasi pemantauan kualitas air laut, dan kelembagaan desa pesisir; serta penguatan unggulnya Jepara dengan pemerataan pendidikan WAJAR 13 tahun bagi anak nelayan, optimalisasi PKBM terintegrasi pesantren pesisir, dan revitalisasi sarana pendidikan anti-abrasi. Program lanjutan mencakup penguatan sarana kesehatan nelayan, penyediaan rumah layak huni di permukiman pantai, infrastruktur jalan konektivitas ke kawasan industri Kembang, peningkatan produksi perikanan dan akuakultur untuk ketahanan pangan, serta pengembangan paket wisata bahari integratif Karimunjawa dengan digitalisasi layanan dan bank sampah pesisir. Seluruh prioritas ini, termasuk penanggulangan bencana abrasi dan pemberdayaan UMKM perikanan, bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi biru secara berkelanjutan.

3.1.2. Pemantapan infrastruktur dalam memperkuat Pembangunan sumberdaya manusia dan ekonomi daerah

Kebijakan pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Jepara tahun 2027 difokuskan pada Pemantapan infrastruktur dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi pesisir, sebagaimana



selaras dengan RPJMD 2025-2029 (Perda No. 3 Tahun 2025). Strategi utama mencakup pemantapan sarana jalan dan jembatan pesisir untuk konektivitas antar-dermaga nelayan serta ketahanan pangan berbasis perikanan berkelanjutan; peningkatan prasarana pelabuhan seperti Pelabuhan Terpadu Kembang untuk mendukung ekowisata dan industri pengolahan hasil laut; penyediaan fasilitas dasar pendidikan, kesehatan, dan permukiman layak bagi masyarakat pesisir; serta penguatan pelayanan publik berbasis teknologi untuk monitoring abrasi dan restorasi mangrove.

Untuk mencapai tujuan tersebut, prioritas pembangunan pesisir menekankan pemantapan tata kelola transparan melalui infrastruktur IT pemantauan kualitas air laut dan kelembagaan desa pesisir; penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal seperti pengetahuan nelayan tradisional, wajib belajar 13 tahun di blankspot pulau kecil, serta kurikulum STEAM adaptif untuk vokasi akuakultur. Selain itu, optimalisasi peran pendidikan nonformal terintegrasi pesantren pesisir, peningkatan akses kesehatan primer bagi nelayan, sanitasi pantai aman, penuntasan permukiman kumuh rawan abrasi, infrastruktur jalan anti-erosi, kewirausahaan digital UMKM pengolahan ikan, sistem mitigasi bencana berbasis GIS, penguatan sarana ketertiban umum di pelabuhan, prasarana perikanan untuk produksi kerang darah dan tangkapan berkelanjutan, peningkatan daya saing koperasi nelayan, serta transformasi green economy melalui rehabilitasi terumbu karang dan wisata religius bahari yang terhubung dengan digitalisasi pariwisata pesisir.

3.1.3. Peningkatan Pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing serta penguatan transformasi social

Kebijakan pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Jepara tahun 2028 diarahkan pada Peningkatan SDM pesisir yang kompeten, produktif, dan berdaya saing serta penguatan transformasi sosial nelayan, sebagaimana selaras dengan RPJMD 2025-2029 (Perda No. 3 Tahun 2025). Strategi utama mencakup peningkatan kualitas SDM nelayan melalui pelatihan keselamatan maritim dan budidaya berkelanjutan, pemerataan pemberdayaan sosial inklusif bagi perempuan pesisir, pembangunan berbasis gender untuk ketahanan keluarga nelayan, optimalisasi produktivitas tenaga kerja di sektor perikanan, serta peningkatan kondusivitas wilayah melalui pengelolaan abrasi dan mitigasi bencana pesisir.

Untuk mendukung tujuan tersebut, prioritas pembangunan pesisir meliputi peningkatan tata kelola transparan dengan kompetensi ASN di bidang pengawasan mangrove dan perikanan (s), penguatan layanan kesehatan nelayan produktif (i), optimalisasi prasarana perikanan seperti pelabuhan terpadu di Kembang (s), ketangguhan infrastruktur terhadap perubahan iklim dan abrasi (ff), pengembangan green economy berbasis ekowisata serta akuakultur kerang darah (ee), dan peningkatan kesiapsiagaan bencana pesisir (q). Prioritas ini juga mencakup konektivitas dermaga pesisir (v), vokasional potensi lokal seperti pengolahan ikan (m), serta integrasi smart tourism untuk wisata bahari (dd), guna mewujudkan pengelolaan pesisir terpadu yang lestari dan mendukung Jepara Mulus.



3.1.4. Peningkatan daya saing sektor ekonomi tingkat lokal, nasional dan global

Kebijakan pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Jepara pada tahun 2029 mengarah pada optimalisasi kinerja pengelolaan terpadu, dengan tema peningkatan daya saing sektor ekonomi biru tingkat lokal, nasional, dan global, sebagaimana diuraikan dalam RPJMD 2025-2029 (Perda No. 3 Tahun 2025). Strategi utama mencakup peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor unggulan pesisir seperti akuakultur kerang darah, pengolahan hasil tangkapan ikan, dan ekowisata mangrove; penguatan investasi melalui digitalisasi pelabuhan terpadu di Kembang serta ekonomi hijau berbasis mitigasi abrasi; peningkatan SDM nelayan yang kompetitif dan berakhlak mulia; serta pemerataan pemberdayaan sosial inklusif bagi masyarakat pesisir rentan.

Untuk mendukung target tersebut, prioritas pengelolaan pesisir menekankan akselerasi tata kelola transparan melalui digitalisasi perizinan perusahaan laut dan partisipasi publik dalam marine spatial planning, serta percepatan Kawasan Pesisir Jepara Unggul dengan optimalisasi perikanan berkelanjutan, hilirisasi produk laut berbasis riset, standar wisata bahari global, dan konektivitas dermaga anti-abrasi. Program ini juga mencakup peningkatan layanan kesehatan nelayan, mitigasi risiko bencana pesisir seperti abrasi, branding ekowisata religius-lokal, smart tourism digital, energi terbarukan dari ombak, serta penguatan UMKM halal pesisir melalui literasi keuangan syariah, memastikan keseimbangan lestari sesuai visi Jepara MULUS.



3.1.5. Pemantapan daya saing daerah dan sumber daya manusia menuju terwujudnya Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari dan Religius

Kebijakan pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Jepara hingga 2030 diarahkan pada Pemantapan daya saing daerah dan sumber daya manusia menuju Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari dan Religius sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara 2025-2029 (Perda No. 3 Tahun 2025). Strategi pengelolaan pesisir terpadu mencakup pemantapan sektor ekonomi lokal berbasis perikanan dan akuakultur seperti budidaya kerang darah yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB, perwujudan SDM unggul melalui pelatihan nelayan berbasis STEAM untuk teknologi pengolahan hasil laut, serta penyediaan infrastruktur dermaga dan pelabuhan terpadu di Kecamatan Kembang yang berwawasan lingkungan untuk mitigasi abrasi dan konektivitas kawasan industri. Pendekatan ini juga melibatkan birokrasi digital untuk monitoring mangrove via aplikasi layanan terintegrasi, pemerataan pemberdayaan sosial bagi masyarakat pesisir inklusif, serta penguatan kondusivitas wilayah melalui pengurangan risiko bencana abrasi.

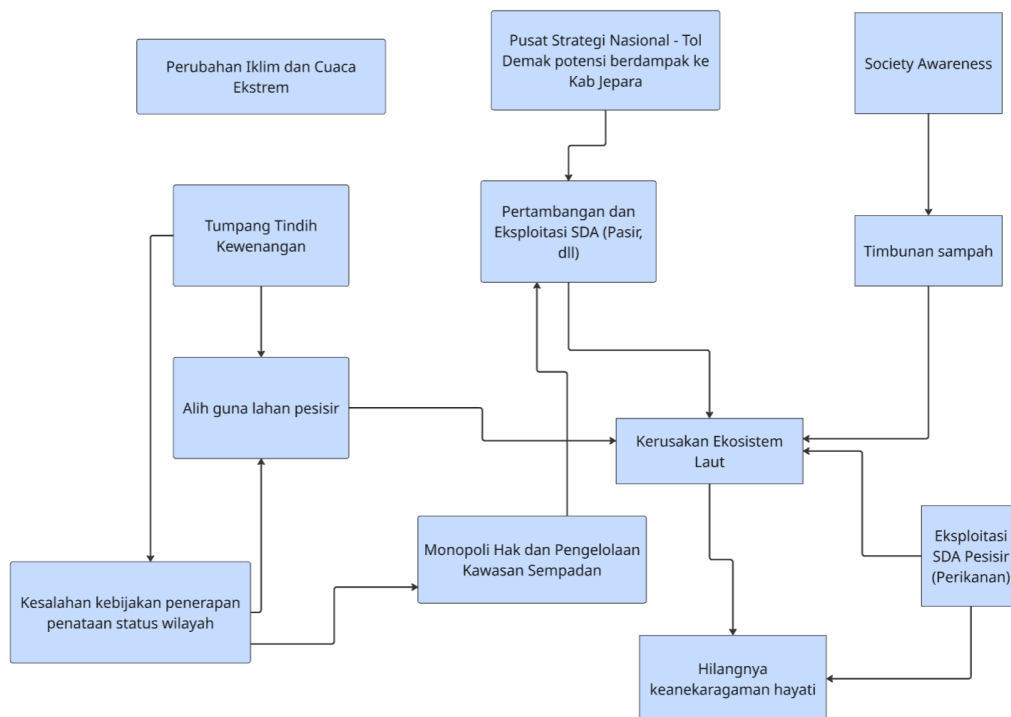
Prioritas pengelolaan pesisir mendukung tata kelola bersih melalui integrasi layanan publik digital untuk perizinan ekowisata pantai, pemantapan pendidikan vokasional berorientasi potensi lokal seperti pengelolaan terumbu karang, optimalisasi layanan kesehatan nelayan, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis hilirisasi produk perikanan dengan diversifikasi riset inovasi. Program ini mencakup pencegahan anak putus sekolah di desa pesisir melalui PPATS terintegrasi pondok pesantren pesisir, ketahanan keluarga nelayan, penguatan pertanian-perikanan unggulan seperti akuakultur berkelanjutan, serta sistem koordinasi mitigasi bencana abrasi dengan kolaborasi pemerintah-industri-akademisi IPB untuk riset

mangrove. Selain itu, prioritas menekankan konektivitas wilayah melalui infrastruktur pelabuhan ramah lingkungan, akses air bersih dan sanitasi pesisir, pengembangan desa wisata berkelanjutan (sustainable tourism), transisi ekonomi hijau biru, serta pemerataan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan di kawasan pantai.

3.2. Pemetaan Isu Permasalahan

3.2.1. Tantangan Kerusakan Ekosistem Laut dan Pesisir serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Jepara

Kerusakan ekosistem laut dan pesisir saat ini menjadi masalah serius yang dipicu oleh ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dampak dari kerusakan ini sangat nyata, seperti abrasi pantai yang menggerus wilayah pesisir, sedimentasi yang mengendap di muara sungai, pencemaran limbah yang merusak kualitas air, serta penurunan hasil tangkapan nelayan yang mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir. Berikut pemetaan isu masalah infrastruktur dan sanitasi kawasan pesisir Kabupaten Jepara serta perangkian isu strategis berdasarkan skala prioritas berdasarkan *Logical Framework Analysis*:



Gambar 2 Peta isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kab. Jepara

Tabel 1 Skala prioritas isu sumber daya pesisir dan ekologi Kab. Jepara

Isu Prioritas	Penyebab	Akibat	Nilai	Peringkat
Kesadaran publik	2		2	3
Timbunan Sampah	8	1	9	1
Eksplorasi SDA Pesisir	4		4	3
Hilangnya keanekaragaman Hayati		3	3	3
Kerusakan ekosistem pesisir dan Laut	10	1	11	1
Pertambangan dan Eksploitasi SDA (pasir, dll)	4	2	6	2
Proyek Strategis Nasional	2	2	4	3
Ketidakjelasan regulasi		4	4	3
Tumpang tindih kebijakan	2	3	5	2
Alih guna lahan	4	2	6	2
Monopoli pengelolaan	4	1	5	2
Perubahan iklim		3	3	3

Hasil analisis skala prioritas menunjukkan bahwa isu kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta timbunan sampah menempati urutan tertinggi (skala prioritas 1). Kedua isu ini dipandang sebagai masalah paling mendesak karena langsung berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kerusakan ekosistem pesisir, termasuk degradasi mangrove, lamun, dan terumbu karang, telah menurunkan fungsi ekologis kawasan serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana abrasi dan rob. Sementara itu, permasalahan timbunan sampah di wilayah pantai menimbulkan pencemaran, menurunkan kualitas wisata bahari, serta mengancam kesehatan masyarakat pesisir.

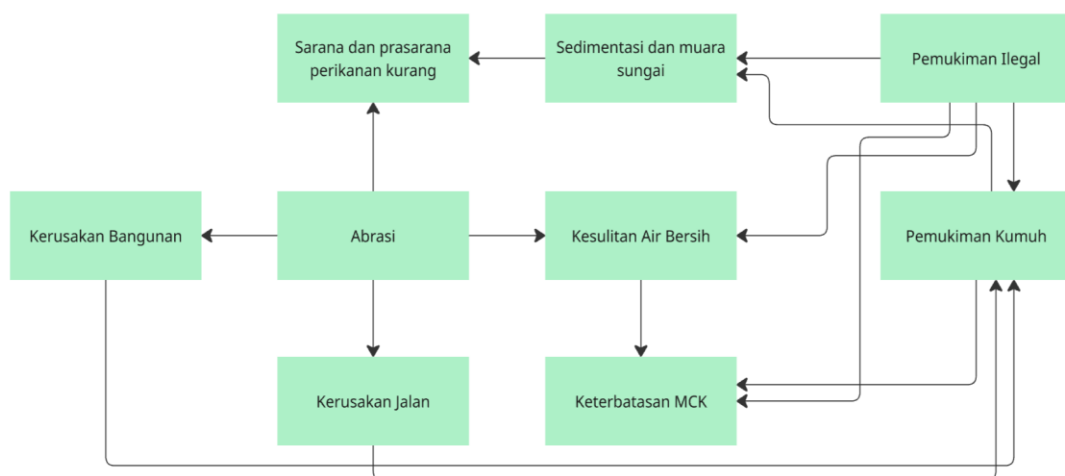
Isu lain yang juga mendapat perhatian adalah pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam (pasir, dll.), alih guna lahan, dan monopoli pengelolaan yang ditempatkan pada prioritas menengah (skala 2). Isu ini berhubungan dengan meningkatnya tekanan pembangunan dan konflik kepentingan antar sektor, sehingga memerlukan regulasi yang lebih jelas dan pengawasan ketat. Adapun isu hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta ketidakjelasan regulasi berada pada prioritas rendah (skala 3). Meskipun berada di prioritas rendah, isu-isu ini tetap penting karena bersifat struktural dan berdampak jangka panjang terhadap tata kelola pesisir.

3.2.2. Tantangan Infrastruktur serta Sanitasi di Kawasan Pesisir Kabupaten Jepara

Pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Kabupaten Jepara, seperti pelabuhan baru, membawa peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, di sisi lain, pembangunan ini juga berpotensi memicu munculnya permukiman kumuh dan ilegal di sekitar area pelabuhan. Fenomena ini sering terjadi akibat urbanisasi yang tidak terkelola dengan

baik, di mana masyarakat berbondong-bondong datang untuk mencari peluang ekonomi tanpa adanya perencanaan tata ruang yang matang. Oleh karena itu, antisipasi terhadap dampak urbanisasi dan peningkatan ekonomi di daerah pesisir menjadi sangat penting untuk mencegah timbulnya masalah sosial dan lingkungan di masa depan.

Pemetaan isu masalah infrastruktur dan sanitasi kawasan pesisir Kabupaten Jepara serta pemeringkatan isu strategis berdasarkan skala prioritas berdasarkan *Logical Framework Analysis*. Perencanaan tata ruang yang baik menjadi kunci utama dalam mengelola pertumbuhan kawasan pesisir. Dengan perencanaan yang tepat, pemerintah dapat mengatur zonasi permukiman, kawasan industri, dan area konservasi sehingga dapat mencegah berkembangnya permukiman kumuh dan ilegal. Selain itu, tata ruang yang terencana juga mampu mengakomodasi kebutuhan penduduk baru tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.



Gambar 3 Peta isu infrastruktur dan sanitasi Kab. Jepara

Tabel 2 Skala prioritas isu infrastruktur dan sanitasi Kab. Jepara

Isu Prioritas	Penyebab	Akibat	Nilai	Peringkat
Permukiman ilegal	8		8	1
Permukiman kumuh	6	3	9	1
Sedimentasi di muara sungai	2	2	4	3

Isu Prioritas	Penyebab	Akibat	Nilai	Peringkat
Kesulitan air bersih	2	3	5	2
Keterbatasan MCK		3	3	3
Keterbatasan sarana prasarana perikanan		2	2	3
Abrasi	6		6	2
Kerusakan jalan	2	1	3	3
Kerusakan bangunan	2	1	3	3

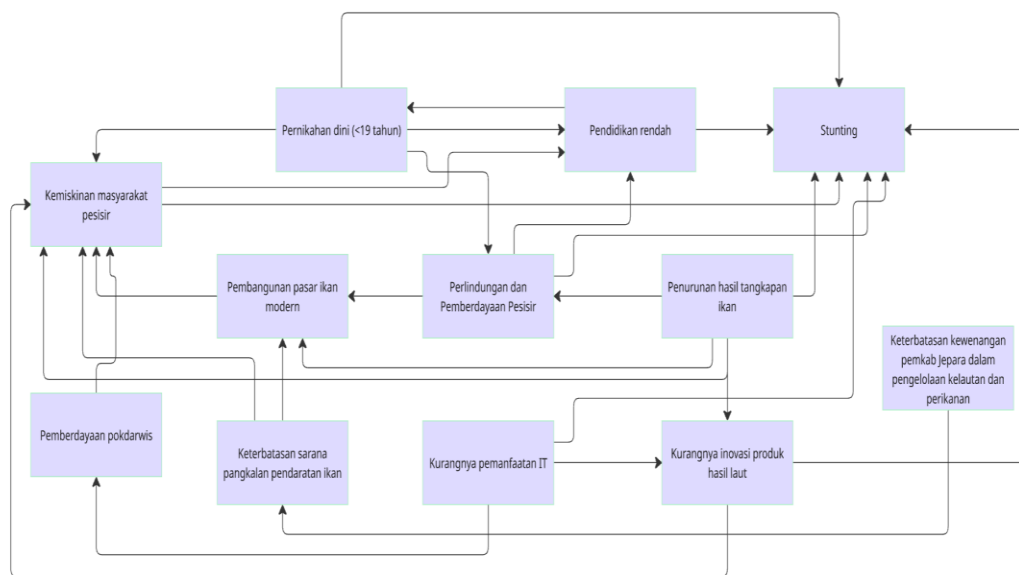
Aspek infrastruktur dan sanitasi, isu permukiman ilegal dan permukiman kumuh menempati prioritas tertinggi (skala 1). Masalah ini terkait erat dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan pesisir, yang menyebabkan keterbatasan lahan dan munculnya permukiman yang tidak tertata. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi, menurunkan kualitas lingkungan, serta menimbulkan beban tambahan terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Isu lain seperti abrasi pantai, kesulitan air bersih, dan keterbatasan sarana prasarana perikanan ditempatkan pada prioritas menengah (skala 2). Hal ini menunjukkan perlunya penanganan segera agar tidak semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat pesisir. Sementara itu, isu sedimentasi di muara sungai, keterbatasan MCK, serta kerusakan infrastruktur dasar (jalan dan bangunan) berada pada prioritas rendah (skala 3). Walaupun demikian, isu ini tetap perlu diperhatikan karena mempengaruhi konektivitas dan kualitas hidup masyarakat.

3.2.3. Permasalahan dan Solusi Sosial Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Jepara

Masyarakat pesisir menghadapi berbagai permasalahan sosial ekonomi yang kompleks, mulai dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, hingga penurunan hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber

utama penghidupan mereka. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai, pelatihan usaha yang tepat sasaran, serta penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan agar keberlanjutan sumber daya laut tetap terjaga. Selain itu, pernikahan dini menjadi isu sosial yang signifikan dan perlu ditangani melalui sosialisasi yang intensif, konseling bagi keluarga muda, serta pemberdayaan ekonomi keluarga agar mereka memiliki alternatif penghidupan yang lebih baik dan dapat menunda pernikahan pada usia yang lebih matang. Berikut pemetaan isu masalah infrastruktur dan sanitasi kawasan pesisir Kabupaten Jepara serta pemeringkatan isu strategis berdasarkan skala prioritas menggunakan *Logical Framework Analysis*:



Gambar 4 Peta isu sosial ekonomi Kab. Jepara

Tabel 3 Skala prioritas isu sosial ekonomi masyarakat pesisir Kab. Jepara

Isu Prioritas	Penyebab	Akibat	Nilai	Peringkat
Kemiskinan Masyarakat pesisir	4	7	11	1
Pemberdayaan Pokdarwis	2	2	4	3
Pernikahan Dini	6	1	7	2
Pembangunan pasar ikan modern	2	3	5	2

Isu Prioritas	Penyebab	Akibat	Nilai	Peringkat
Keterbatasan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan	4	1	5	2
Pendidikan rendah	8	2	10	1
Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir	6	2	8	2
Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi	8	1	9	1
Stunting/Gangguan pertumbuhan		7	7	2
Penurunan hasil tangkapan	10		10	1
Kurangnya inovasi hasil laut	6	3	9	1
Keterbatasan kewenangan Pemerintah kabupaten	2		2	3

Secara sosial-ekonomi, isu kemiskinan masyarakat pesisir, pendidikan rendah, penurunan hasil tangkapan, serta kurangnya inovasi hasil laut mendapat prioritas tertinggi (skala 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan struktural dalam ekonomi pesisir Jepara masih sangat dominan. Tingginya angka kemiskinan diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan, sehingga menghambat kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan inovasi. Selain itu, penurunan hasil tangkapan memperburuk kerentanan nelayan, sementara minimnya inovasi dalam pengolahan hasil laut membatasi peluang peningkatan nilai tambah.

Isu lain yang menempati prioritas menengah (skala 2) adalah perkawinan di bawah umur, pembangunan pasar ikan modern, keterbatasan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan, perlindungan masyarakat pesisir, dan gangguan pertumbuhan (stunting). Permasalahan ini berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan akses terhadap sarana ekonomi. Sementara itu, isu pemberdayaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten ditempatkan pada

prioritas rendah (skala 3). Meskipun rendah, isu-isu ini tetap berperan penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan efektivitas tata kelola pemerintahan di wilayah pesisir.

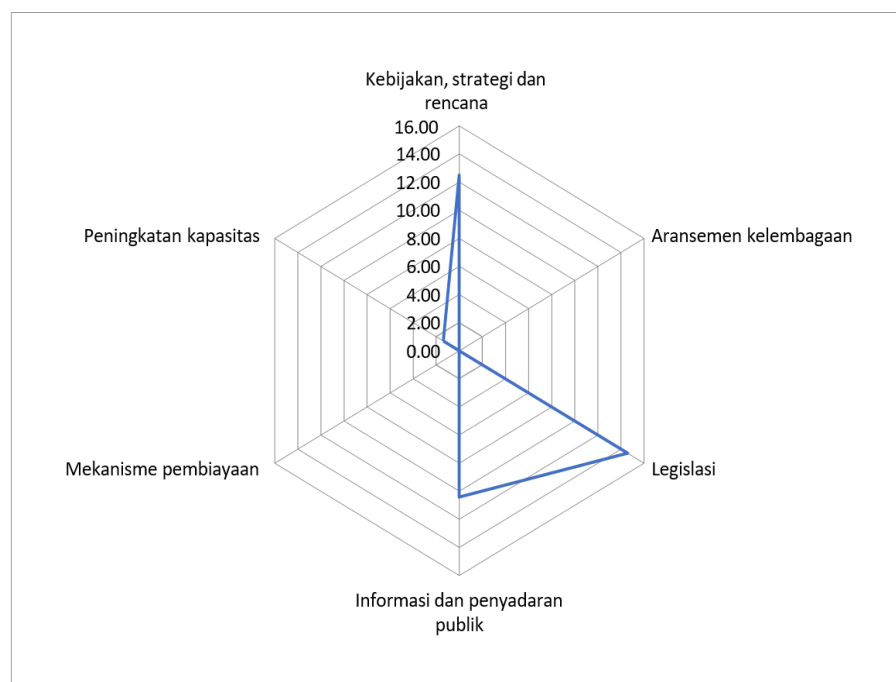
3.3. Penilaian Status Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Jepara berdasarkan State of The Coast

Menggunakan dokumen *State of the Coast* atau Status Lingkungan Pesisir Kabupaten Jepara 2023, Kabupaten Jepara memiliki capaian pengelolaan pesisir yang relatif tidak merata, terutama pada aspek tata kelola. Terdapat kesenjangan yang signifikan di mana sejumlah indikator krusial masih berstatus "Buruk". Kelemahan ini mencakup area fundamental seperti mekanisme koordinasi antar lembaga, pelibatan pemangku kepentingan, penyadaran publik, serta ketiadaan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pesisir dan pemahaman terkait Pengelolaan Pesisir Terpadu (ICM) juga berada pada status "Buruk". Ironisnya, di tengah kelemahan tata kelola tersebut, satu-satunya aspek yang mengindikasikan status "Baik" adalah pada pengelolaan kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan.

Kesenjangan serupa juga tercermin pada aspek pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Jepara menghadapi tantangan serius pada pilar ekologi dan resiliensi, di mana indikator-indikator vital seperti kebencanaan, perlindungan habitat, pengelolaan pencemaran, serta pemantauan kualitas air seluruhnya menunjukkan status "Buruk". Kondisi ini sangat kontras dengan capaian pada pilar lainnya. Aspek konservasi sumber daya air serta kualitas sosial ekonomi masyarakat (yang mencakup penghidupan, kemiskinan, dan gizi) justru mengindikasikan status "Baik".



Sementara, pada indikator pengelolaan limbah, Kabupaten Jepara berada pada status "Sedang". Meskipun tidak "Buruk", status ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini belum optimal dan masih membutuhkan banyak perbaikan ke depan. Secara keseluruhan, potret ini menggambarkan adanya pencapaian yang baik pada aspek sosial-ekonomi dan konservasi air, namun di saat yang sama terdapat kelemahan struktural yang parah pada tata kelola kelembagaan dan perlindungan ekosistem pesisir.



Gambar 5 Diagram radar posisi antar elemen tata kelola Kabupaten Jepara

Sumber: *State of the Coast* Kabupaten Jepara, 2023

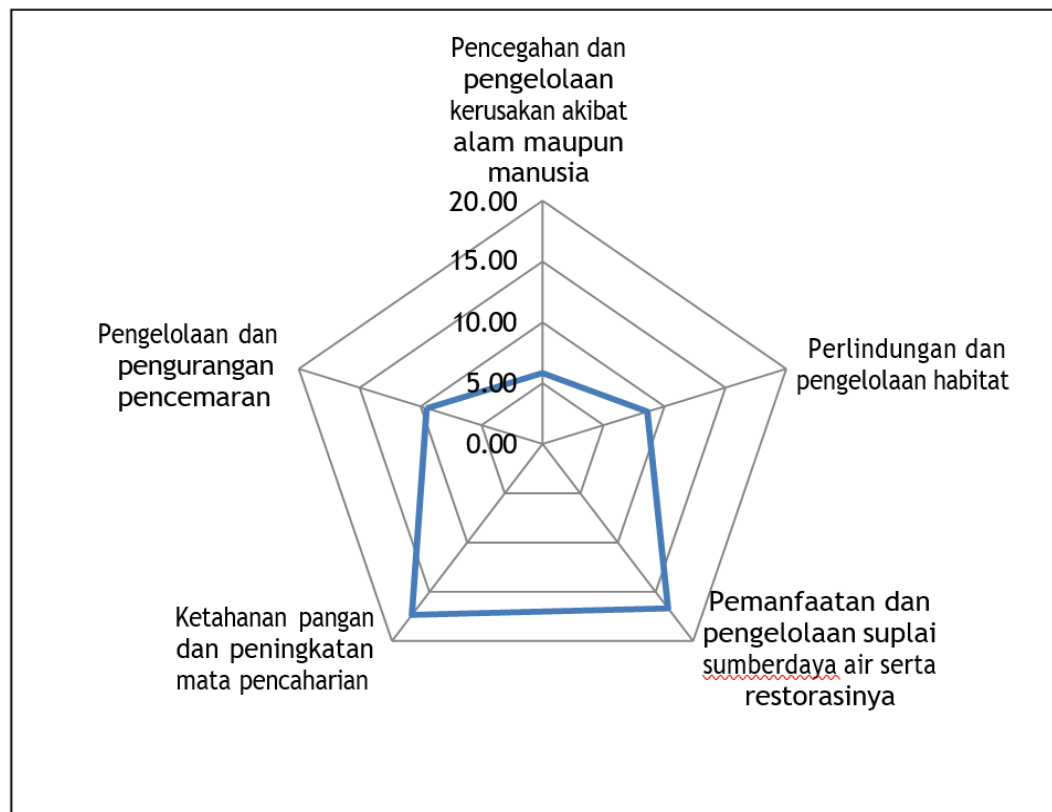
Diagram radar tata kelola Kabupaten Jepara menyajikan sebuah profil yang sangat spesifik, di mana terdapat kekuatan yang terkonsentrasi pada tiga elemen kunci. Capaian tertinggi dicatatkan oleh "Kebijakan, strategi dan rencana" (skor 15.00), yang diikuti oleh "Legislasi" (skor 14.00). Menariknya, "Informasi dan penyadaran publik" juga menunjukkan skor

yang relatif tinggi (skor 11.00). Kombinasi dari ketiga skor dominan ini mengindikasikan bahwa secara normatif dan perencanaan, Kabupaten Jepara telah memiliki fondasi yang kuat. Pemerintah daerah telah berhasil merumuskan kerangka hukum, dokumen perencanaan strategis, dan bahkan telah melakukan upaya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.

Akan tetapi, kekuatan pada aspek perencanaan tersebut berbanding terbalik secara drastis dengan pilar-pilar fungsional atau implementasi. Tiga elemen eksekusi krusial menunjukkan kondisi yang sangat lemah, bahkan lumpuh. "Peningkatan kapasitas" dan "Mekanisme pembiayaan" mencatatkan skor 0.00, yang menandakan ketiadaan investasi sistematis untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan absennya alokasi anggaran yang berkelanjutan. Diperparah lagi, "Aransemen kelembagaan" juga menunjukkan skor yang sangat rendah (sekitar 1.00), yang mengimplikasikan lemahnya atau tidak adanya institusi yang memiliki mandat, otoritas, dan fungsi koordinasi yang jelas untuk mengeksekusi rencana yang telah dibuat.

Secara sintesis, diagram ini mendiagnosis adanya kesenjangan implementasi yang sangat akut dalam sistem tata kelola Kabupaten Jepara. Terdapat disfungsi yang jelas antara kerangka normatif (yang sudah sangat baik) dengan kerangka fungsional (yang sangat buruk). Kondisi ini menciptakan situasi di mana kebijakan dan legislasi yang telah dirumuskan hanya menjadi "kebijakan di atas kertas" karena tidak didukung oleh prasyarat implementasi yang paling mendasar: yaitu kelembagaan yang efektif (aktor), pendanaan yang memadai, dan kapasitas SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, prioritas intervensi ke depan bukanlah penyusunan rencana baru, melainkan pembangunan pilar-pilar operasional yang hilang tersebut.





Gambar 6 Diagram radar posisi antar elemen tata kelola Kabupaten Jepara

Sumber: *State of the Coast* Kabupaten Jepara, 2023

Diagram radar pembangunan berkelanjutan Kabupaten Jepara menunjukkan sebuah pola strategi yang sangat berorientasi pada pilar sosial-ekonomi. Hal ini terlihat jelas dari dua elemen yang mencatatkan skor tertinggi secara dominan, yaitu Pemanfaatan dan pengelolaan suplai sumberdaya air dan Ketahanan pangan dan peningkatan mata pencaharian, yang keduanya mencapai skor tinggi sekitar 15.00. Capaian ini mengindikasikan bahwa prioritas utama pembangunan daerah terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, menjamin ketersediaan air bersih dan irigasi, serta memperkuat fondasi ekonomi dan penghidupan masyarakat.

Sebaliknya, terdapat kesenjangan yang sangat besar pada pilar-pilar yang menopang keberlanjutan ekologi dan resiliensi. Tiga elemen sisanya

mencatatkan skor yang sangat rendah secara signifikan. Elemen Pencegahan dan pengelolaan kerusakan akibat alam maupun manusia hanya berada di skor sekitar 6.00, sementara dua elemen krusial lainnya, yaitu Perlindungan dan pengelolaan habitat dan Pengelolaan dan pengurangan pencemaran, berada di level terendah dengan skor hanya sekitar 4.00.

Secara sintesis, diagram ini memotret sebuah model pembangunan yang tidak seimbang. Terdapat fokus yang sangat kuat pada pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi jangka pendek, namun di saat yang sama terjadi pengabaian serius terhadap fondasi ekologis jangka panjang. Strategi ini sangat berisiko, karena ketahanan pangan dan ketersediaan suplai air yang menjadi prioritas utama justru sangat bergantung pada kesehatan habitat dan lingkungan yang bebas pencemaran. Tanpa perbaikan signifikan pada aspek perlindungan habitat, mitigasi bencana, dan pengelolaan polusi, capaian sosial-ekonomi yang telah diraih saat ini akan menjadi sangat rentan dan tidak berkelanjutan di masa depan.

Namun, untuk mencapai pembangunan yang benar-benar berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Berikut beberapa rekomendasi strategies yang dapat dirumuskan dalam pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir Kabupaten Jepara dapat dilihat pada matriks berikut ini:



Tabel 4 Matriks rangkuman temuan kunci SoC dan rekomendasi

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
1	Kebijakan dan Strategi ICM	• Profil pesisir tidak ditemukan secara khusus dalam beberapa dokumen di Kabupaten Jepara • Perencanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut dimuat dalam Perda No. 13/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 • Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025; • Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031; • Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; • Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; • Gender sudah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengarusutamaan gender memuat Indeks	• Pemerintah Kabupaten Jepara masih melakukan berbagai program terkait pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap para nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah, serta pemasar ikan skala kecil, termasuk didalamnya adalah kaum perempuan yang dominan bekerja di pengolah dan pemasar. Terkait dengan kewenangan, perlu adanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengelolaan wilayah pesisir, sehingga keterbatasan anggaran dan SDM bisa dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah terkait Kabupaten Jepara.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		Pembangunan Gender (IPG) dan Pengarusutamaan Gender di Daerah (PUG) yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.	
2	Aransemen Kelembagaan	Pembangunan di wilayah pesisir dan laut dilakukan secara sendiri-sendiri oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi setingkat badan. Peran koordinasi untuk harmonisasi tugas dan fungsi antar instansi secara formal dilakukan oleh Bappeda. Sejauh ini belum ada unit kerja non-struktural yang membantu fasilitasi koordinasi antar instansi dalam percepatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Perencanaan pembangunan di wilayah pesisir menyatu dengan perencanaan pembangunan pada umumnya.	Bappeda Kabupaten Jepara memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan hingga evaluasi, perlu didukung oleh unit kerja yang bersifat non-struktural. Salah satu contoh unit kerja ini adalah <i>Program Coordinating Committee</i> (PCC) dan <i>Program Management Office</i> (PMO). Keberadaan lembaga ini tidak hanya mengkoordinasikan tugas dan fungsi antara OPD/Badan yang terkait dengan pembangunan wilayah pesisir dan laut, akan tetapi juga menjadi sekretariat bersama dalam mensinkronkan dan mengharmoniskan antar program OPD/Badan
		- Perencanaan pembangunan mulai tingkat daerah hingga pusat dimulai dengan MUSRENBANG berdasarkan PP Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, RPJPD, RPJMD, dan RKPD - Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan	Partisipasi publik mendapatkan pengakuan dalam Musrenbang dan dikuatkan dalam peraturan daerah. Namun demikian, dalam rangka membuka akses publik secara luas pada setiap dokumen perencanaan, maka diperlukan



No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		mengikutsertakan pemangku kepentingan. Selain itu, pelibatan masyarakat juga diakomodir dalam PP Nomor 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dimuat dalam Perda Jawa Tengah Nomor 13/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038	keaktivitas penyampaian dokumen dalam berbagai media informasi. Hal ini dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan peningkatan akses publik pada dokumen
3	Legislasi dan Kepatuhan	• Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja program peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah pelayanan dokumen lingkungan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan selama kegiatan berlangsung • pencegahan pencemaran air dan udara dari perusahaan yang dipantau belum sepenuhnya mentaati dokumen lingkungan maupun peraturan perundangan tentang pengelolaan lingkungan,	• Dinas Lingkungan Hidup tidak terdampak serius oleh UU No. 23 Tahun 2014, sehingga keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara sangat penting keberadaannya dalam mengawal keberlanjutan wilayah pesisir dan laut dari ancaman kerusakan. Oleh sebab itu, optimalisasi dari tugas dan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merusak perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		sesuai dengan kriteria persyaratan teknis maupun administratif yang telah ditetapkan.	
		Pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi dominan bersumber dari pengaduan masyarakat. Pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan terdiri dari jumlah mediasi sengketa lingkungan dan jumlah kasus yang berlanjut ke penegakan hukum.	Permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks memerlukan keterlibatan semua para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, diperlukan kedisiplinan, transparansi, kejujuran dan keberanian aparat dalam menegakkan hukum bagi pelanggarnya.
4	Informasi dan Penyadaran Publik	- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara tahun 2017-2022, isu penyadaran dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tidak dinyatakan secara eksplisit. DLH Kabupaten Jepara tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas untuk mengelola lingkungan di wilayah pesisir - Program sosialisasi penyadaran masyarakat dalam pentingnya menjaga sumberdaya alam dan lingkungan masih bersifat urgensi, belum dilakukan secara rutin. - Masih terbatasnya mobilitas masyarakat pesisir dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia serta belum optimalnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan	- Perlu pelimpahan kewenangan dan alokasi anggaran dari provinsi setelah adanya koordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan tingkat provinsi untuk ikut melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran publik di pesisir kabupaten. - Disarankan untuk menggunakan sarana-sarana konvensional seperti surat edaran, radio, tv lokal, dan sosialisasi rutin untuk menyampaikan isu-isu penting terkait lingkungan. - Peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan teknologi informasi dan perlunya kajian kebutuhan untuk menentukan media yang efektif.



No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		Media informasi untuk masyarakat belum merata ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Jepara.	
		• Belum optimalnya data terkait partisipasi dan mobilisasi <i>stakeholders</i> dalam kegiatan pengelolaan pesisir dan lingkungan secara berkelanjutan. • Belum adanya mekanisme partisipasi <i>stakeholder</i> non-pemerintah dalam kegiatan penyadaran publik.	• Perlu adanya sistem penyimpanan data yang mudah di akses • Perlu adanya penguatan kemitraan dan memaksimalkan peluang kemitraan dalam pengelolaan pesisir dan lingkungan • Perlu disusun mekanisme partisipasi <i>stakeholder</i> non-pemerintah dalam kegiatan penyadaran publik.
5	Mekanisme Pembiayaan	• Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan hilangnya kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berdampak pada program perencanaan termasuk penganggarannya • Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir masih menjadi urusan Dinas Perikanan dengan berbagai keterbatasan kewenangannya. Dalam implementasinya, kegiatan pengelolaan pesisir masih dilakukan secara parsial, belum ada lembaga bersama yang menjadi sekretariat dalam melakukan koordinasi terkait pengelolaan wilayah pesisir. Pendanaan kegiatan wilayah pesisir masih	• Perlu adanya lembaga yang dapat mengkoordinasikan organisasi antar perangkat daerah (OPD) serta multi pihak sekaligus menjadi sekretariat bersama dalam melakukan sinkronisasi program-program pembangunan wilayah pesisir secara terpadu, sekaligus mengatur mekanisme pendanaan bersama.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		berdasarkan pada penganggaran kegiatan tahunan di masing-masing OPD, belum ada aturan yang mengatur mekanisme pendanaan terkait dengan program pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan melibatkan multi pihak.	
6	Peningkatan Kapasitas	Aparatur-aparatur Kabupaten Jepara yang memiliki kualifikasi keahlian dan kompetensi bidang pengelolaan pesisir tidak ada. Terdapat beberapa staf yang sudah mendapatkan paparan mengenai ICZM tapi tidak dalam lingkup pelatihan secara intensif sesuai dengan lingkup ICM dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang pengelolaan pesisir.	- Diperlukan ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam bidang pengelolaan pesisir terpadu - Perlu adanya alokasi dana yang berkelanjutan untuk program peningkatan kapasitas SDM dalam bidang ICM.
		- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam bidang pengelolaan kawasan pesisir secara terintegrasi dan terpadu. - Masih sedikitnya program peningkatan kapasitas SDM dalam ICM.	- Membentuk unit khusus berisi staf yang relatif tetap, memiliki pendidikan yang dekat dengan ICM dan bekerja pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan sumberdaya pesisir. - Ketika unit ICM terbentuk secara tetap dan berlandaskan hukum, baru dilaksanakan pelatihan ICM sesuai lingkup kurikulum ICM yang dilaksanakan oleh pihak yang kompeten melakukan ICM Training.



No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
7	Pencegahan Kerusakan Alam dan Manusia	- Kabupaten Jepara tidak memiliki dokumen strategis dalam penanggulangan bencana - Kabupaten Jepara tidak memiliki Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim - Tampaknya isu kebencanaan tenggelam sementara isu adaptasi perubahan iklim tidak muncul dalam narasi dan diskusi di publik maupun di pengambil kebijakan di Jepara - Tata laksana penanggulangan bencana dan perubahan iklim bisa dikatakan sangat minimal, banyak aspek- aspek penting manajemen data dan pencatatan melupakan pentingnya ada disagregasi data.	- Mengupdate RPB 2016-2020 dengan RPB yang baru sesuai dengan format dan metodologi yang ditentukan oleh BNPB - Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam dokumen RPB baru di atas - Melakukan identifikasi awal mengenai risiko-risiko yang muncul akibat perubahan iklim di Kabupaten Jepara - BPBD Jepara membutuhkan pengembangan kapasitas baru mengenai adaptasi perubahan iklim serta manajemen bencana yang lebih rapi dan efektif.
8	Perlindungan dan pengelolaan habitat	- Belum tersedianya produsen data untuk habitat/ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut - Belum tersedianya SDM yang dapat mengimplementasikan rencana pengelolaan habitat pesisir. - Program dan mekanisme pemantauan dan pengawasan habitat pesisir masih belum tersedia - Dokumen rencana pengelolaan pesisir perlu dimutakhirkan untuk tahun terbaru pada periode akhir dari RPJPD Kabupaten Jepara.	- Pemutakhiran data secara berkala untuk habitat/ekosistem mangrove dan sumberdaya pesisir lainnya (terrestrial). - Peningkatan kapasitas dan keahlian SDM dan masyarakat lokal harus dilakukan dengan mengikutsertakan atau mengadakan pelatihan - Dokumen dan legalitas hukum atau kebijakan rencana pengelolaan perlu dibuat agar upaya pengelolaan dapat lebih fokus dan efektif

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
			Penyusunan RPJMD dan Renstra perlu memasukkan unsur kebaharian dan kemaritiman dalam progam pembangunannya.
9	Pemanfaatan dan Pengelolaan Suplai Sumber Daya Air	- Sudah ada pengelolaan dan pengembangan sumber daya air untuk penyediaan air baku, dan konservasi - Pemanfaatan sumber daya air digunakan sebagai sumber air minum dan kebutuhan air domestik serta kegiatan pertanian - Penanganan terkait genangan banjir dan rob masih menjadi persoalan yang perlu dituntaskan	- Perlunya adanya regulasi dan penanganan terkait banjir, rob, dan tanah longsor yang dapat berpotensi dapat merusak sumber daya air. - Perlunya pengetatan regulasi terkait pembangunan di sekitar sempadan sumber air dan pembukaan lahan terbuka hijau. - Sinergitas seluruh elemen terkait dalam penanganan permasalahan banjir, rob dan tanah longsor terutama dalam konservasi wilayah hulu yang menjadi daerah serapan air.
10	Ketahanan Pangan dan Peningkatan Mata Pencarian	- Program-program yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah pesisir masih didominasi oleh program di sektor perikanan. Ada 3 (tiga) program utama Dinas Perikanan Kabupaten Jepara yaitu program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Dalam rangka untuk mendukung program perlindungan maka dilakukan sosialisasi mengenai	Pencatatan data statistik perikanan telah dilakukan dalam laporan perikanan dalam angka yang dibuat secara series data tahunan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jepara. Namun demikian, data perikanan merupakan data yang sangat dinamis, tergantung pada kondisi alam dan musim. Untuk menjawab perubahan-perubahan tersebut, maka dibutuhkan data yang lebih rinci dengan periode bulanan.



No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		peraturan mengenai pelestarian ekosistem laut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pelestarian ekosistem laut • Untuk meningkatkan ketersediaan stok ikan maka dilakukan kegiatan penebaran ikan (<i>re-stocking</i>) di perairan umum darat. • Adanya keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga terdapat beberapa program pengelolaan seperti program rehabilitasi mangrove tidak lagi menjadi program prioritas pemerintah kabupaten.	Dengan demikian, setiap situasi yang dihadapi baik permasalahan dan tantangan dapat dijawab berdasarkan data dan informasi yang tersedia. • Untuk peningkatan produksi perikanan tangkap diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat, terutama dalam pengelolaan ruang laut.
		• Untuk program pengelolaan perikanan tangkap, dilakukan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	• Untuk peningkatan produksi perikanan tangkap diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama dalam pengelolaan ruang laut Produksi budidaya perikanan masih perlu didorong untuk penyediaan pakan dengan harga yang kompetitif • Untuk itu masih dibutuhkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, akses modal dan pasar dalam mendorong peningkatan dalam bidang pengolahan dan pemasaran produk olahan perikanan

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		• Program-program pengembangan budidaya perikanan melalui pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, • Produksi perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan mengalami fluktuasi, namun ada juga yang mengalami peningkatan yang konsisten. • Perkembangan data produksi perikanan di Kabupaten Jepara telah tersedia secara <i>series</i> tahunan.	• Pencatatan data statistik perikanan telah dibuat secara series data tahunan. Namun demikian, data perikanan merupakan data yang sangat dinamis, sehingga dibutuhkan data yang lebih rinci dengan periode bulanan.
		• Persentase Gizi Masyarakat dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan dari tahun ke tahun; • Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2022 secara keseluruhan dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis memperoleh angka sebesar 95,90% dan dinyatakan "BAIK". Dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis pada 5 (lima) sasaran strategis yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 5 (lima) indikator yang memiliki kinerja sesuai atau melebihi target. Indikator yang pencapaiannya di bawah target ada 3 (tiga), yaitu: persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar, persentase puskesmas yang minimal memiliki 9	• Rekomendasi bagi Pemda Kabupaten Jepara dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui upaya penyediaan sumberdaya (manusia, sarana dan prasarana) kesehatan yang memadai. • Optimalisasi dukungan lintas sektor dan komitmen bersama karena tanggung jawab masalah kesehatan bukan hanya milik Dinas Kesehatan saja, melainkan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan juga keterlibatan peran dunia usaha/swasta.



No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		(jenis) jenis tenaga kesehatan dan persentase capaian inerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target.	
		- Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan dan menduduki posisi tertinggi melebihi garis kemiskinan provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara menduduki urutan ketiga terendah setelah Kabupaten/Kota Semarang dan Kabupaten Salatiga. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan berfluktuasi antar periode, yang artinya dalam dua tahun terakhir, pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan dan semakin timpang. - Nilai kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara adalah rata-rata sebesar 105,342% atau kategori "Sangat Baik". Masih terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai 100% yaitu Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; dan Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs (45,29%), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,74 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,1 persen Serapan tenaga kerja terbesar	Meningkatkan dan memperluas strategi dan program yang telah dijalankan karena berhasil memposisikan diri sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Provinsi Jawa Tengah. Untuk urusan kependidikan, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi Jepara- Jepara yang dihadapi, antara lain: 1) Mengusulkan ke <i>stakeholder</i> terkait untuk menambah pengangkatan tenaga pendidikan; 2) Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan mutu dan motivasi guru; 3) Penambahan dukungan dana yang lebih besar untuk peningkatan honorarium guru GTT/PTT; 4) Mendorong tenaga pendidikan untuk berinovasi tentang model pembelajaran dan menambah kegiatan lomba yang berkaitan inovasi pendidikan (inobel); 5) Mendorong minat dan motivasi pemuda untuk berwirausaha; 6) Memberikan stimulus

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		pada lapangan kerja di sektor Industri Pengolahan, mencapai 44,70 % (300.159 jiwa) dari total jumlah penduduk yang bekerja, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel (21,46 %) serta sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (12,91 %).	bantuan permodalan usaha; 7) Peningkatan jumlah atlit dan pelatih di pemusatan pelatihan; 8) Peningkatan pengelolaan cabang olah raga unggulan; 9) Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan atlit dan pelatih; dan 10) Peningkatan penghargaan kepada atlit dan pelatih yang berprestasi.
		• Pada tahun 2025, dari total jumlah Nelayan yaitu 8.301 orang, terdapat 22 orang nelayan perempuan (0,43%) Program Dinas Perikanan Kabupaten Jepara yang mendukung Pemberdayaan masyarakat yaitu: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) • Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan • Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	• Dibutuhkan adanya program regenerasi yang memancing minat generasi muda bekerja pada sektor perikanan. Program-program pengembangan mata pencaharian masyarakat di wilayah pesisir tidak hanya menjadi urusan Dinas Perikanan, melainkan harus melibatkan instansi lainnya. Dengan demikian, dibutuhkan lembaga yang dapat menjadi sekretariat bersama untuk mendukung ekosistem pengembangan masyarakat pesisir baik dari segi kebijakan maupun anggaran pengembangan programnya.



No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	
11	Pengurangan Pencemaran dan Dampak Pencemaran	• Program pengelolaan pencemaran dan limbah B3 masih fokus di darat, dan belum secara khusus untuk wilayah pesisir • Program pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan limbah B3 masih belum terdokumentasi secara khusus dari dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup • Kabupaten Jepara telah menyusun mekanisme atau SOP Pengaduan. Mekanisme ini memberikan akses dan pengetahuan bagi publik untuk melaporkan dan turut mengawasi aktivitas industri • Data kualitas air laut belum tersedia • Pemantauan terkait dampak pencemaran terhadap masyarakat belum dilakukan, terutama terkait dampak limbah B3 terhadap kesehatan masyarakat jangka panjang.	• Menyusun rencana pengurangan pencemaran dan dampak pencemaran dengan memasukkan wilayah pesisir dan laut • Menyusun rencana pengelolaan pencemaran secara terstruktur secara terpisah, berdasarkan kategori jenis dan sumber pencemar • Melakukan pendataan kualitas air laut di wilayah pesisir maupun muara sungai • Upaya penyadartahuan dari tingkat masyarakat dan pelaku industri hendaknya lebih intensif dilakukan. Program pengelolaan dampak kepada masyarakat, terutama limbah B3, harus dilakukan secara berkala. Hal ini terkait dampak yang tidak langsung muncul saat kejadian pencemaran.
		Terkait kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam 5 (lima) tahun ada pembangunan TPA di daerah	• Adapun program untuk bidang sanitasi yang dilakukan adalah peningkatan penerapan

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		Donorojo dan Wilayah Jepara Selatan. Dalam Dokumen Rencana Strategis Perubahan Kabupaten Jepara tahun 2017-2022, Kegiatan pembangunan TPA selama kurun waktu tahun 2017-2022 dilaksanakan dengan melaksanakan hasil KLHS untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem sebagai berikut : 1) Penggunaan teknologi pengolahan sampah untuk dapat mengurangi dampak dan memanfaatkan limbah sampahnya; 2) TPA yang sudah ada atau bangunan TPA baru perlu untuk dilengkapi sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah; 3) Menyediakan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau; dan 4) Pentingnya membangun kesadaran masyarakat • Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah domestik antara lain terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam membangun infrastrukturnya, kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan air limbah domestik yang benar, keterbatasan lahan dalam pembangunan pengelolaan air limbah sistem <i>off-site</i>, pertambahan penduduk yang tinggal, cakupan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyediaan kebutuhan sanitasi juga sarana air bersih yang memadai sesuai jumlah Desa dan KK, dan pengelolaan limbah domestik yang lebih komprehensif. Diharapkan ketersediaan data yang lebih lengkap agar monitoring dan evaluasi akan bidang sanitasi dan pengelolaan limbah domestik dapat dilakukan dengan lebih baik.



No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		layanan air bersih belum merata dan penurunan kualitas lingkungan akibat pengelolaan air limbah domestik yang belum optimal	

Tabel 5 Matriks isu strategis SoC, RPJPD Kab. Jepara, dan RPJMD dan pemetaan FGD Kab Jepara

Isu Strategis (Temuan SOC 2023)	Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045	Prioritas Program RPJMD 2025-2029	
Adaptasi Perubahan Iklim & Kebencanaan (Belum adanya Dokumen API & update RPB)	Mewujudkan ketahanan wilayah pesisir terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim.	Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).	• Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam dokumen RPB baru di atas • Melakukan identifikasi awal mengenai risiko-risiko yang muncul akibat perubahan iklim di Kabupaten Jepara • pengembangan kapasitas baru mengenai adaptasi perubahan iklim serta manajemen bencana yang lebih rapi dan efektif.

Isu Strategis (Temuan SOC 2023)	Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045	Prioritas Program RPJMD 2025-2029	
Konservasi & Perlindungan Habitat (Kurangnya data mangrove & pengawasan habitat)	Pelestarian ekosistem laut dan pesisir sebagai penyangga biodiversitas dan ekonomi biru.	Inventarisasi data habitat pesisir secara berkala dan penguatan rehabilitasi mangrove/terumbu karang.	Menguatkan rehabilitasi ekosistem pesisir secara berkelanjutan
Tata Kelola & Kelembagaan ICM (Perlu Unit Koordinasi Non-Struktural seperti PMO/PCC)	Transformasi birokrasi yang adaptif dan kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam.	Pembentukan sekretariat bersama/Unit Koordinasi ICM untuk mensinkronkan program antar OPD pesisir.	Komunikasi antar pihak-pihak atau ruang diskusi terkait isu-isu dalam penggunaan tata ruang laut
Pengendalian Pencemaran Pesisir (Fokus limbah masih di darat & minim data air laut)	Pencapaian standar kualitas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.	Penguatan sistem pemantauan kualitas air laut dan pengelolaan limbah B3 industri serta domestik di pesisir.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Intrusi Air Laut & Air Baku (Ancaman rob terhadap ketersediaan air bersih)	Menjamin kedaulatan sumber daya air dan keamanan infrastruktur dasar.	Mitigasi intrusi air laut dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) bagi warga terdampak rob.	• Perlindungan sempadan Pantai



Isu Strategis (Temuan SOC 2023)	Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045	Prioritas Program RPJMD 2025-2029	
			Meningkatkan teknis sipil dan vegetasi untuk menanggulangnya
Ekonomi Nelayan & Regenerasi (Ketergantungan sektor perikanan & minimnya minat pemuda)	Penguatan kedaulatan pangan laut dan transformasi ekonomi masyarakat pesisir.	Program regenerasi nelayan muda, penyediaan sarana prasarana perikanan, dan akses modal usaha mikro.	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)



BAB IV KELEMBAGAAN

Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Jepara dilaksanakan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan pembentukan tim kerja lintas sektor, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari perangkat daerah teknis, akademisi, tokoh masyarakat pesisir, hingga unsur dunia usaha yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan wilayah pesisir. Tim kerja ini diberi mandat untuk merumuskan tujuan pengelolaan pesisir secara komprehensif, melakukan identifikasi dan pemetaan isu-isu strategis yang mencakup aspek ekologi, sosial-ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, serta menyusun strategi dan rencana aksi yang konkret, implementatif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Seluruh proses ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyusunan dokumen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat pesisir serta dinamika tantangan lingkungan yang terus berkembang.

Hingga saat ini, tim kerja ini belum mendapatkan penetapan secara legal dari kepala daerah Kabupaten Jepara. Tim ini memiliki fungsi sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program lintas sektor. Keberadaan tim ini menjadi elemen kunci untuk menjamin bahwa perumusan kebijakan dan rencana aksi pengelolaan pesisir dilakukan secara terstruktur, selaras dengan visi pembangunan daerah, responsif terhadap perubahan lingkungan, serta inklusif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Jepara diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang kuat, adaptif, dan konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 6 Rancangan struktur tim koordinasi pengelolaan pesisir terpadu Kabupaten Jepara

No	Kedudukan	Jabatan
1	Pengarah	Bupati Jepara
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
3	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara
4	Anggota	1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara 3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara 5. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jepara 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 14. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara 15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara 16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara

No	Kedudukan	Jabatan
5	Tim Ahli	1. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 2. Universitas Diponegoro Teluk Awur Jepara 3. SMK Negeri 1 Jepara
6	Tim Kemitraan	1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan 3. OISCA 4. Aji Cakra Indonesia 5. Forum Nelayan Jepara 6. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Jepara 7. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jepara 8. PLTU Tanjung Jati B
KELOMPOK KERJA		
7	Koordinator Pokja Sosial Ekonomi	Kabid Perekonomian, Infrastruktur, SDA, dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Jepara
	Anggota	1. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Jepara 2. Kabid Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Jepara 3. Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Jepara 4. Kabid UKM pada DiskopUKMNakertrans Kabupaten Jepara 5. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinsospermasdes Kabupaten Jepara
8	Koordinator Pokja Ekologi Dan Sda	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Jepara
	Anggota	1. Kabag Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara 2. Kabid Bina Marga pada DPUPR Kabupaten Jepara 3. Kabid Ketahanan Pangan pada DKPP Kabupaten Jepara 4. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara 5. Kepala Cabang Dinas Kelautan (CDK) Wilayah Timur DKP Jateng

No	Kedudukan	Jabatan
9	Koordinator Pokja Infrastruktur Dan Sanitasi	Kabid Cipta Karya pada DPUPR Kabupaten Jepara
	Anggota	1. Kabid Perhubungan Laut pada Dishub Kabupaten Jepara 2. Kabid Kawasan Permukiman pada Disperkim Kabupaten Jepara 3. Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 4. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Jepara 5. Kabid Pengelolaan Persampahan pada DLH Kabupaten Jepara

Sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan, menjadi kunci dalam mendukung pengelolaan pesisir yang efektif. Kolaborasi ini perlu diwujudkan dalam bentuk program-program bersama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pihak terhadap pentingnya pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Dengan melibatkan masyarakat, fokus pada aspek sosial ekonomi dan ketangguhan akan lebih terjaga, sehingga mereka dapat merasa memiliki dan berkontribusi dalam keberlangsungan pesisir.

Tujuan akhir dari semua inisiatif ini adalah mewujudkan Kabupaten Jepara yang lebih baik melalui pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat dan sinergi yang baik antara semua pihak, harapan untuk mengamankan dan memajukan wilayah pesisir Jepara menjadi lebih realistis. Melalui pengelolaan yang terencana, responsif, dan inklusif, pesisir Kabupaten Jepara dapat menjadi sumber daya yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga dapat dilestarikan untuk generasi mendatang

BAB V

STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN

5.1 Sintesis Isu Strategis

5.1.1. Isu Strategis Sosial–Ekonomi Kabupaten Jepara

Isu sosial–ekonomi pesisir Jepara menunjukkan pola kerentanan struktural yang kuat, ditandai oleh tingginya angka kemiskinan pesisir, rendahnya tingkat pendidikan, penurunan hasil tangkapan ikan, dan lemahnya kapasitas inovasi serta pengolahan hasil laut. Kemiskinan masyarakat pesisir—yang menempati prioritas tertinggi (skala 1)—didorong oleh menurunnya daya dukung sumber daya ikan, rendahnya keterampilan teknis, terbatasnya akses modal, serta dominasi usaha kecil informal tanpa nilai tambah yang memadai. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi pendidikan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan pendidikan. Dampak lanjutannya yaitu penurunan kapasitas adaptasi, minimnya diversifikasi mata pencaharian, serta meningkatnya ketidakmampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi baru, termasuk ekowisata bahari dan usaha berbasis hasil laut.

Isu sosial seperti pernikahan dini, stunting, dan ketimpangan akses layanan dasar memperlemah kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya menurunkan daya saing ekonomi jangka panjang. Minimnya inovasi pengolahan hasil laut dan rendahnya pemanfaatan teknologi (IT) mempersempit kapasitas UMKM pesisir untuk menembus pasar yang lebih luas. Program pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok nelayan, pembudidaya, dan Pokdarwis, belum berjalan optimal akibat keterbatasan

kewenangan pemerintah kabupaten pasca berlakunya UU 23/2014 serta minimnya lembaga koordinatif dalam pengelolaan pesisir. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi terpadu yang menggabungkan peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan ekonomi biru, dan integrasi kelembagaan lintas sektor untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir Jepara.

5.1.2. Isu Strategis Ekologi & Sumber Daya Alam Kabupaten Jepara

Isu ekologis dan sumber daya pesisir Jepara berada pada tingkat prioritas tinggi, khususnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut, timbunan sampah, eksploitasi SDA, serta alih fungsi lahan (prioritas 1 dan 2). Degradasi pada ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi ekologis penting seperti penahan abrasi, penyedia habitat pembesaran ikan, serta perlindungan dari intrusi air laut. Masifnya alih fungsi lahan untuk permukiman, wisata, industri, dan tambak tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas serta pengawasan lintas sektor yang efektif. Tumpang tindih kewenangan dan lemahnya aransemen kelembagaan menghasilkan kebijakan yang tidak sinergis dan berdampak pada meningkatnya eksploitasi SDA pesisir secara tidak terkendali.

Isu timbunan sampah pesisir yang menjadi prioritas tertinggi menunjukkan kegagalan sistem pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran publik, dan minimnya infrastruktur persampahan di pesisir. Sementara itu, perubahan iklim, abrasi, dan kenaikan muka air laut semakin memperburuk kerentanan pesisir Jepara, terutama pada wilayah padat penduduk dan daerah wisata. Ketidaktersediaan data kualitas air laut, lemahnya sistem pemantauan habitat, serta ketiadaan rencana aksi adaptasi perubahan iklim, memperbesar risiko hilangnya biodiversitas dan kerugian ekonomi. Dengan kondisi tersebut, agenda rehabilitasi ekosistem pesisir, pengurangan



pencemaran, penguatan regulasi, dan integrasi adaptasi perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan sumber daya pesisir Jepara.

5.1.3. Isu Strategis Sanitasi & Infrastruktur Kabupaten Jepara

Isu sanitasi dan infrastruktur pesisir Jepara menunjukkan tingkat kerentanan fisik dan layanan dasar yang signifikan. Prioritas tertinggi berada pada pemukiman ilegal dan pemukiman kumuh, yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi pelabuhan dan urbanisasi pesisir yang tidak diikuti oleh perencanaan tata ruang yang adekuat. Ketidakteraturan permukiman meningkatkan risiko sosial, sanitasi buruk, serta memperburuk pencemaran lingkungan. Keterbatasan air bersih, terutama akibat intrusi air laut, memperburuk daya dukung lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat pesisir.

Infrastruktur perikanan seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dermaga, dan sarana prasarana perikanan lainnya masih terbatas dan tidak mampu mengimbangi kebutuhan rantai pasok perikanan yang semakin besar. Isu abrasi, sedimentasi muara sungai, serta kerusakan jalan-bangunan menunjukkan bahwa infrastruktur fisik pesisir Jepara belum adaptif terhadap dinamika oseanografi dan perubahan iklim. Minimnya MCK, kurangnya sistem pengelolaan limbah domestik, dan buruknya fasilitas sanitasi memperburuk prevalensi penyakit dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, diperlukan strategi penataan permukiman, penyediaan layanan air bersih, peningkatan infrastruktur dasar, serta pembangunan fasilitas perikanan modern yang mendukung ekonomi biru.

Tabel 7 Isu-isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah Kab. Jepara

Kelompok Isu Besar	Sub-Isu	Akar Permasalahan	Dampak Strategis
Sosial Ekonomi	Kemiskinan pesisir; pendapatan nelayan rendah; pendidikan rendah; putus sekolah; pernikahan dini; stunting; keterbatasan keterampilan; minimnya inovasi pengolahan hasil laut; rendahnya literasi digital; ketergantungan pada sektor informal; lemahnya kelembagaan ekonomi lokal	Kualitas SDM rendah; minim akses modal; kurangnya diversifikasi usaha; rendahnya nilai tambah hasil laut; layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal; lemahnya posisi tawar masyarakat pesisir; terbatasnya peluang kerja dan pelatihan vokasional	Kemiskinan kronis; rendahnya daya saing tenaga kerja; pendapatan masyarakat stagnan; meningkatnya kerentanan sosial; hambatan pertumbuhan UMKM pesisir; rendahnya partisipasi ekonomi biru
Ekologi & SDA	Kerusakan ekosistem mangrove–lamun–karang; timbunan sampah pesisir; pencemaran laut; abrasi; sedimentasi muara; degradasi kualitas air; alih fungsi lahan pesisir; eksploitasi SDA berlebihan; penurunan biota laut; tekanan wisata pesisir	Alih fungsi lahan tidak terkendali; lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi; pengelolaan sampah buruk; pertumbuhan wisata tidak terencana; tekanan aktivitas perikanan; kurangnya rehabilitasi ekosistem; minim data pemantauan kualitas lingkungan	Degradasi ekosistem pesisir; hilangnya jasa lingkungan; penurunan hasil perikanan; meningkatnya risiko bencana pesisir; penurunan daya dukung wisata; meningkatnya biaya pemulihan lingkungan; menurunnya ketahanan pesisir terhadap perubahan iklim

Kelompok Isu Besar	Sub-Isu	Akar Permasalahan	Dampak Strategis
Sanitasi & Infrastruktur	Permukiman kumuh dan ilegal; keterbatasan air bersih; MCK tidak memadai; buruknya pengelolaan limbah domestik; kerusakan sarpras perikanan; dermaga dan PPI kurang memadai; sedimentasi muara; abrasi; kerusakan jalan pesisir; rendahnya infrastruktur adaptif	Infrastruktur tidak adaptif terhadap perubahan iklim; tata ruang pesisir tidak efektif; intrusi air laut; minim investasi infrastruktur dasar; rendahnya layanan sanitasi; kurangnya sarana persampahan; sedimentasi tinggi pada sungai-muara	Menurunnya kualitas hidup masyarakat; meningkatnya penyakit berbasis lingkungan; inefisiensi aktivitas perikanan; mobilitas dan rantai pasok terganggu; risiko bencana meningkat; munculnya kawasan kumuh; menurunnya daya tarik wisata

Berdasarkan hasil analisis isu strategis yang mencakup tiga klaster utama sosial ekonomi, ekologi dan sumber daya alam, serta sanitasi dan infrastruktur maka penyusunan rencana aksi pengelolaan pesisir Kabupaten Jepara perlu diarahkan pada intervensi yang terintegrasi, terukur, dan berbasis pada akar permasalahan. Analisis menunjukkan bahwa tekanan terbesar berada pada kerusakan ekosistem pesisir, timbunan sampah, kemiskinan pesisir, rendahnya kualitas sumber daya manusia, permukiman kumuh, dan keterbatasan layanan dasar. Kompleksitas masalah tersebut menuntut pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan institusi pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap risiko jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan wilayah pesisir dalam jangka panjang.

5.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan yang disusun dalam matriks di bawah ini merupakan instrumen operasional untuk menindaklanjuti isu prioritas secara sistematis. Rencana aksi tersebut difokuskan pada rehabilitasi ekosistem pesisir, pengurangan pencemaran, penguatan tata kelola sumber daya alam, penataan permukiman kumuh dan ilegal, penyediaan akses air bersih, peningkatan infrastruktur perikanan, pemberdayaan ekonomi pesisir, peningkatan kapasitas pendidikan dan gizi, serta pengembangan inovasi ekonomi biru. Seluruh rencana aksi ini dirancang agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD Jepara 2024–2029 dan mendukung tercapainya pembangunan pesisir yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim



Tabel 8 Isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kab. Jepara

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/ Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
1	Meningkatkan program rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, karang)	Luasan ekosistem yang direhabilitasi	Menguatkan rehabilitasi ekosistem pesisir secara berkelanjutan	Penanaman mangrove, vegetasi pantai	Luas tanam berhasil tumbuh >70%	DLH, DISKAN, Balai TNK, masyarakat	Pesisir Jepara, Karimunjawa		Tahunan	APBD, APBN, donor
2	Mengurangi pencemaran dan sampah pesisir	Berkurangnya timbunan sampah pesisir	Peningkatan kesadaran publik	Program edukasi, aksi bersih pesisir	Frekuensi aksi dan jumlah peserta meningkat	DLH, Disdikpora, komunitas	Kawasan pantai & muara		Semester	APBD, CSR
3	Meningkatkan pengelolaan SDA pesisir berkelanjutan	Menurunnya eksploitasi berlebihan	Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Penegakan hukum, sosialisasi regulasi	Jumlah kasus pelanggaran berkurang	DISKAN, Satpol PP, BKSDA, aparat desa	Perairan pesisir & TNK		Tahunan	APBD, KKP
4	Mengurangi Alih fungsi lahan pesisir	Berkurangnya alih fungsi lahan pesisir	Penegakkan regulasi (Perda RTRW) Peningkatan kesadaran publik	Sosialisasi regulasi dan peningkatan kesadaran public Inventarisasi status kepemilikan lahan di	Menurunkan alih fungsi lahan pesisir	Bappeda, Diskan, Satpol PP, DLH, BPN, Pemerintah Desa	Kawasan pesisir di Jepara		Semester	APBD, APBN, NGO

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/ Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				sempadan pantai						
5	Mewujudkan kelestarian biota laut	Meningkatkan biota laut (<i>restocking</i>) Ekosistem laut terjaga	Penegakkan hukum Edukasi	Penegakkan Hukum terhadap alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan	Hasil tangkapan ikan meningkat Menurunkan eksploitasi penangkapan ikan	KKP, DKP Provinsi, Diskan, TNI Polairud, BKSDA, BTNKJ, CDK Wilayah Timur	Kawasan Perairan Jepara dan Kepulauan Karimunjawa		Semester	APBD, APBN, NGO
6	Tekanan wisata pesisir	Menurunnya kerusakan ekosistem Budaya lokal terjaga	Pemberian edukasi multisektor di kawasan pesisir Pengelolaan sampah terpadu	Penyuluhan Papan himbauan Pelibatan tokoh masyarakat	Menurunkan dampak dari tekanan wisata (sosial budaya, kerusakan ekosistem,	Tokoh masyarakat, Tokoh agama, pengelola pesisir, pokwasmas, Diskan, Disparbud, DLH, DKP Prov., KKP	Kawasan Pesisir /desa wisata di Jepara		Triwulan	APBD, APBN, NGO, CSR
7	Mengurangi laju degradasi kualitas air laut	Meningkatnya kualitas air laut Meningkatnya keanekaragaman hayati di laut Perbaikan ekosistem	Pemantauan ketaatan limbah industri dan rumah tangga Pemantauan uji kualitas air laut dan Sungai	Pengambilan sampel uji kualitas air secara rutin. Pembuatan regulasi terkait pengelolaan	Terjaganya kualitas air sesuai baku mutu lingkungan yang berlaku Ketaatan indsutri dalam pengelolaan air limbah	DLH, Diskan, DKP, DLHK, KKP, KLH, Disperindag, Diskopukm-nakertrans, Dinsos-permasdes,,	Kabupaten Jepara		Semester	APBD, APBN, NGO, CSR

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/ Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
			Pembuatan dan penegakkan regulasi	sungai dan laut	Meningkatnya nilai IKLH Kabupaten	Bag. Hukum Setda,				
8	Menangani sedimentasi Muara	Berkurangnya sedimentasi muara Berkurangnya alih fungsi lahan di Hulu Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pembuangan sampah	Sosialisasi Kegiatan Penegakkan Tata ruang Rehabilitasi mangrove	Sosialisasi Masyarakat, pembuatan papan himbauan Pembatasan alih fungsi lahan Rehabilitasi mangrove	Meningkatnya kesadaran masyarakat Berkurangnya sedimentasi muara Mengembalikan DAS sebagaimana fungsinya Meningkatnya hutan mangrove	ATR/BPN/BPD, Satpol PP, DLH, DLHK, Diskan, DKP, KLH, KKP, Nelayan, Masyarakat pesisir	Wilayah Pesisir Kab. Jepara		Semester	APBN, APBD, NGO, CSR
9	Abrasi	Berkurangnya laju abrasi di wilayah pesisir	Perlindungan sempadan Pantai Meningkatkan teknis sipil dan vegetasi untuk menanggulangi	Rehabilitasi hutan mangrove, Pembangunan teknis sipil	Meningkatnya luas rehabilitasi Menurunnya laju abrasi	DLH, Diskan, DKP, DLHK,	Wilayah Pesisir Kab. Jepara		Semester	APBN, APBD, NGO, CSR
10	Hilangnya Peta Wilayah	Tersedianya data Wilayah Terumbu	Pemetaan Wilayah	Berkoordinasi dengan CDK	Tersedianya data Wilayah Terumbu	KKP, DKP Provinsi,	Wilayah Terumbu Karang di		Semester	APBN, APBD, NGO, CSR

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/ Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
	Terumbu Karang	Karang area Jepara	Terumbu Karang	Wilayah Timur Inventarisasi Wilayah Terumbu Karang	Karang area Jepara	Diskan, BKSDA, CDK Wilayah Timur, Pushidrosal	Jepara (Karang Perngitan, Ombo, Jongok, Njombang, Alastuo, Karang Mbayuran, Lemah abang, Karang pendowo)			

Tabel 9 Isu infrastruktur dan sanitasi Kab. Jepara

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
1	Meningkatkan penataan permukiman pesisir	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan permukiman kumuh & ilegal	Program penyelenggaraan penataan ruang Program kawasan permukiman Program perumahan dan kawasan	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukannya	Disperkim, Satpol PP, DPUPR	Permukiman pesisir Jepara		2026–2029	APBD, Provinsi



No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Berkurangnya jumlah RTLH Tersedianya PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian Luas kawasan kumuh berkurang		permukiman kumuh Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Penertiban & perbaikan kawasan	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani Persentase RTLH yang ditangani Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi hunian Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase luas kawasan tertangani					
2	Meningkatkan akses air bersih	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air	Penyediaan jaringan air bersih	Pembangunan SPAM, sumur, jaringan PDAM	Kapasitas suplai air bertambah	DPUPR, PDAM, BBPW	Desa pesisir Jepara		2026–2030	APBD, APBN

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		bersih meningkat Meningkatnya Akses Air minum layak		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Akses air minum jaringan perpipaan					
3	Meningkatkan infrastruktur perikanan	Bertambahnya fasilitas perikanan	Pengembangan sarpras perikanan	Pembangunan dermaga & PPI	Dermaga/PPI berfungsi	DISKAN, DKP Provinsi	Pesisir utara Jepara		2026–2030	APBD, KKP
4	Meningkatkan fasilitas yang mendukung kesehatan lingkungan	Persentase septic tank individual sesuai standard	Pembuatan infastruktur yang memadai	Pembuatan 1 bio septic tank setiap rumah di seluruh kecamatan yang belum memiliki septic tank	Persentase rumah tangga yang bisa mengakses septic tank bio sesuai standard	DPUPR	Pesisir Kabupaten Jepara		2026-2030	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBN
5	Mengurangi dampak pencemaran limbah domestik	Menurunnya tingkat pencemaran limbah domestik Meningkatnya Akses Sanitasi	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase peningkatan akses Sanitasi yang layak	DPUPR	Kabupaten Jepara		2026-2030	APBD



No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		Layak		Menyediakan IPLT untuk pengelolaan limbah dari tangki septic/WC menggunakan mobil sedot tinja rumah tangga Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase jumlah limbah yang sudah diolah Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sedot tinja					
6	Mewujudkan akses pelayaran yang lancar	Meningkatnya muara sungai yang terpelihara	Operasi dan pemeliharaan sungai	Pengerukan muara sungai dan konservasi DAS	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	DPUPR, BBWS Provinsi	Muara sungai di Seluruh Kabupaten Jepara		2026-2030	APBD Kabupaten, APBN, APBD Provinsi
7	Meningkatkan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah pesisir	Meningkatnya bangunan pelindung pantai yang serta terpeliharanya	Pembangunan soft structure dan hard structure	Penanaman dan rehabilitasi mangrove Pembangunan pemecah gelombang	Banyak mangrove yang berhasil ditanam Persentase luas hutan mangrove	BBWS, PU, DLH, LSM, Masyarakat setempat	Pesisir Kabupaten Jepara		2026-2030	APBD Kabupaten, APBN, APBD Provinsi, CSR

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		ekosistem pesisir		Pembangunan talud di pesisir	Panjang talud yang dibangun dan dipelihara Jumlah pemecah gelombang yang dibangun dan dipelihara					
8	Meningkatkan kualitas fasilitas umum	Meningkatnya kualitas jalan	Peningkatan secara kapasitas (pelebaran jalan) Peningkatan kualitas (overlay/hotmix) Peningkatan struktur (betonisasi)	Program Penyelenggaraan jalan dan pemeliharaan secara berkala	Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	DPUPR, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah (BBPJN)	Pesisir Kabupaten Jepara		2026-2030	APBD Kabupaten, APBD Provinsi
9	Penguatan peran masyarakat pesisir dalam tata kelola ruang laut	Meningkatnya peran masyarakat pesisir dalam tata kelola ruang laut	Komunikasi antar pihak-pihak atau ruang diskusi terkait isu-isu dalam penggunaan tata ruang laut	Adanya pertemuan antar pihak-pihak yang terlibat	Pelibatan masyarakat pesisir dalam semua tahapan tata ruang laut	Bappeda	Jepara		2026	CSR, Hibah

Tabel 10 Isu sosial ekonomi Kab. Jepara

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
1	Mengentaskan kemiskinan pesisir	Menurunnya tingkat kemiskinan (Dinsos) Peningkatan produksi perikanan (DISKAN) Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri (Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah)	Pemberdayaan ekonomi pesisir Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Bantuan sarpras, pelatihan usaha perikanan	Jumlah UMKM & nelayan mandiri bertambah Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	DISKAN, Dinsos, UMKM	Desa pesisir Jepara		Tahunan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Dana pihak lain yang tidak mengikat misal CSR, DBHCHT
2	Meningkatkan pendidikan & kapasitas SDM Pendidik	Meningkatnya partisipasi warga negara yang berpartisipasi dalam PAUD, Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Beasiswa, literasi lingkungan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-18 tahun yang berpartisipasi dalam	Disdikpora, BAZNAS, CSR	Jepara pesisir		2025–2029	APBD, CSR

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Meningkatnya jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Persentase Sekolah dalam kondisi baik Persentase Guru PAUD, Guru SD , Guru SMP serta instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memiliki sertifikat pendidik Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik					
3	Meningkatkan ketahanan gizi & stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (Dinkes)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program gizi, sanitasi, penyuluhan	Cakupan ANC sesuai standar Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi	Dinkes, DKPP	Pesisir rawan stunting		2025–2029	APBD, APBN

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (DKPP) Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan di wilayah rentan Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan		kurang) pada balita Angka Kematian Bayi (AKB) Persentase Konsumsi energi per kapita Persentase Daerah Rawan Pangan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan					
4	Meningkatkan inovasi hasil laut & pariwisata	Meningkatnya Produksi Olahan	Program Pengolahan dan	Pelatihan pengolahan &	Cakupan bina kelompok	DISKAN, Dinpar	PPI & desa wisata		2026–2030	APBD, KKP

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		Hasil Perikanan (Diskan)	Pemasaran Hasil Perikanan	pasar ikan modern	Pengolah dan Pemasar					
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya (Diskan)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Prosentase kelompok nelayan yang terfasilitasi					
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap (Diskan)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan					
		Meningkatnya daya tarik destinasi	Program Peningkatan Daya Tarik		Cakupan bina kelompok Budidaya					
					Prosentase kelompok nelayan yang terfasilitasi					
					Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya					
					Persentase peningkatan					



No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		pariwisata (Dinpar)	Destinasi Pariwisata		kualitas destinasi pariwisata					
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif (Dinpar)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual					
		Meningkatnya daya saing UMKM (Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah)	Program Pengembangan UMKM		Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri					
5	Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Proyek Strategis Daerah	Pembangunan pasar ikan modern & Keterbatasan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan	Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	Diskan (perekonomian) DinPUPR (pembangunan sarpras)				
6	Mewujudkan Perlindungan dan pemberdayaan	Meningkatnya Kapasitas Daya saing Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	Dispora DP3A				

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
	masyarakat pesisir	Terciptanya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Terlaksananya perlindungan khusus perempuan dari kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan		dan Organisasi Sosial kemasyarakatan Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Rasio Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO (Per 100.000 Perempuan) Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO					

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
7	Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi	Terfasilitasinya penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan secara tepat Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi NINJA (Nelayan Indonesia Jaya) Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Program Kesiapsiagaan bencana daerah	Jumlah nelayan sebagai pengguna NINJA Jumlah jiwa yang terdampak bencana	Diskan BPBD				
8	Mengurangi pernikahan dini	Menurunnya persentase kasus pernikahan dini di wilayah sasaran dalam periode perencanaan.	Menguatkan pencegahan pernikahan dini melalui edukasi, pendampingan sosial, dan penguatan peran keluarga serta komunitas.	Pelaksanaan sosialisasi, edukasi kesehatan reproduksi, dan pendampingan remaja serta orang tua di wilayah rawan pernikahan dini.	Meningkatnya tingkat pengetahuan remaja dan keluarga serta berkurangnya permohonan dispensasi nikah.	DP3AP2KB	Semua Desa Pesisir		Setiap tahun	APBD, dana desa, dan dukungan sumber pendanaan lainnya yang sah.



BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

1. Spesifik, Terukur, Realistik, Relevan, dan Berbasis Waktu (SMART): Setiap indikator keberhasilan dirancang agar jelas, kuantitatif, dapat dicapai, relevan dengan tujuan, dan memiliki batas waktu tertentu.
2. Inklusif dan Berkeadilan Sosial: Proses pemantauan memastikan keterlibatan perempuan, pemuda, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Suara mereka dipertimbangkan dalam evaluasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan semua kelompok.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemantauan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, OPD, akademisi, masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan. Proses ini dilakukan secara terbuka dengan pelaporan yang mudah diakses publik.
4. Berkala dan Berkelanjutan: Evaluasi dilaksanakan sesuai siklus tahunan (monitoring jangka pendek) dan lima tahunan (evaluasi jangka panjang), selaras dengan RPJMD dan RPJPD.

6.2. Komponen Pemantauan dan Evaluasi

1. Kinerja Indikator Keberhasilan

Setiap tujuan pengelolaan dan kegiatan memiliki indikator yang spesifik. Misalnya, peningkatan luasan mangrove dapat diukur melalui luas area yang berhasil direhabilitasi; penurunan abrasi dapat dilihat dari berkurangnya garis pantai yang terdampak; kesejahteraan masyarakat diukur melalui peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan; serta

keterlibatan kelompok rentan dievaluasi melalui persentase partisipasi mereka dalam forum pengambilan keputusan.

2. Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan OPD teknis (DLH, Diskan, DPUPR, Dinsos, Disperkim, Dinas Pariwisata, Bappeda), aparat desa, lembaga konservasi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat pesisir. Partisipasi aktif perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dijamin dalam setiap tahapan, baik sebagai responden, pemantau, maupun evaluator partisipatif.

3. Tata Waktu Pelaksanaan

Pemantauan dilakukan secara rutin dengan frekuensi minimal sekali dalam setahun untuk mengukur progres kegiatan, sedangkan evaluasi komprehensif dilakukan pada pertengahan periode (*mid-term review*) dan akhir periode (*end-term review*) RPJMD. Hasil pemantauan dan evaluasi disajikan dalam laporan resmi yang menjadi bahan perbaikan kebijakan, serta dibuka ruang konsultasi publik agar masyarakat dapat memberikan masukan secara langsung.

6.3. Rencana Pemantauan dan Evaluasi Per Tujuan

Rencana pemantauan dan evaluasi dalam Rencana Pengelolaan Pesisir Kabupaten Jepara dirancang secara sistematis dengan memanfaatkan hasil analisis isu strategis, perumusan tujuan pengelolaan, serta strategi dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memastikan keterhubungan yang jelas antara permasalahan, tujuan, dan tindakan yang dilakukan, rencana pemantauan dituangkan dalam sebuah matriks pemantauan.





Supported by
 **Norway**